

---

**INSPEKTORAT II  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



# Laporan Kinerja 2018

---

Jl. Percetakan Negara 23 Gedung I Lt.2  
Jakarta Pusat 10560  
Email: [tuinspektorat2bpom@gmail.com](mailto:tuinspektorat2bpom@gmail.com)  
Telp: (021) 4244691



## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2018 dapat disusun tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Inspektorat II dalam melaksanakan tugas pengawasan intern dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), media penilaian kinerja, media penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan terkait, sebagai media hubungan kerja organisasi baik internal maupun eksternal, dan sebagai media informasi umpan balik dalam rangka perbaikan kinerja secara berkesinambungan

Secara umum sasaran yang dicapai telah sesuai dengan yang direncanakan, namun demikian terdapat beberapa yang belum sesuai dikarenakan Inspektorat II dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan komitmen, kerjasama dan dukungan aktif dari unit kerja lain di lingkungan Badan POM.

Laporan Kinerja Inspektorat II 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan membantu kinerja pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* di masa yang akan datang melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja

Jakarta, 15 Februari 2019  
Inspektur II Badan POM



**Dra. Zulaimah, Apt., M.Si**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat 2018 merupakan perwujudan akuntabilitas Inspektorat II dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2018 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2018. Rencana Kinerja 2018 mengacu pada Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor B-HK.04.03.72.09.18.2921 tentang Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2018 tanggal 7 September 2018.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Inspektorat II sebagai unit pendukung memiliki 8 Sasaran Strategis, yaitu: (1) Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai *Roadmap* RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II; (2) Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai *Trusted Advisor*; (3) Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN; (4) Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II; (5) Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II; (6) Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II; (7) Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai *Roadmap* RB BPOM 2015-2019; (8) Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern.

Sasaran Strategis tersebut didukung oleh 17 (tujuh belas) Indikator Sasaran Capaian IKU Inspektorat tahun 2018 sebagai berikut:

1. Nilai PMPRB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan, dengan capaian sebesar 100%.
2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan, dengan capaian sebesar 111%.
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penelusuran Pengaduan, dengan capaian sebesar 71%.
4. Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern, dengan capaian sebesar 99%.
5. Nilai PMPRB BPOM Yang di-Submit Secara *Online*, dengan capaian sebesar 100%.
6. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB BPOM, dengan capaian sebesar 127%.
7. Jumlah Unit Kerja Yang Memiliki Predikat WBK/WBBM Hasil Evaluasi Internal, dengan capaian sebesar 100%.
8. Persentase Realisasi Rencana Aksi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan, dengan capaian sebesar 100%.
9. Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tepat Waktu, dengan capaian sebesar 101%.
10. Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN Tepat Waktu, dengan capaian sebesar 90%.

11. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Gratifikasi Tepat Waktu, dengan capaian sebesar 83%.
12. Tingkat Keandalan SPIP Pada Mitra Kerja, dengan capaian sebesar 115%.
13. Jumlah Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja, dengan capaian sebesar 100%.
14. Persentase Laporan Keuangan Satker Yang Bebas Dari Kesalahan Material, dengan capaian sebesar 100%.
15. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan *Intern*, dengan capaian sebesar 95%.
16. Nilai AKIP, dengan capaian sebesar 97%.
17. Level Kapabilitas APIP, dengan capaian sebesar 100%.

Dari 17 (tujuh belas) indikator di atas, target tercapai dengan capaian diatas 100% dengan kriteria memuaskan adalah Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan, Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB BPOM, Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tepat Waktu dan Tingkat Keandalan SPIP Pada Mitra Kerja, dengan capaian sebesar 115%.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategis dan IKU serta membiayai kegiatan lainnya, Inspektorat II memperoleh anggaran TA 2018 sebesar Rp.6.129.887.000,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp5.753.768.718,00 dengan pencapaian sebesar 93,86%.

Laporan Kinerja Inspektorat II ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Inspektorat Badan POM pada tahun 2018 dan untuk selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat di masa yang akan datang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
B. Struktur Organisasi .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 .....	12
i. Visi.....	12
ii. Misi .....	12
iii. Tujuan Strategis .....	13
iv. Sasaran Strategis .....	14
v. Strategi .....	18
vi. Program.....	18
B. Rencana Kinerja Tahunan 2018 .....	22
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 .....	22
D. Cara Menghitung Capaian Indikator .....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	27
i. Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2018.....	27
ii. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	31
B. Pencapaian Realisasi Kinerja Terhadap Target 2019 .....	42
C. Realisasi Anggaran .....	45
D. Analisis Efisiensi Kegiatan .....	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Keputusan Inspektur Utama badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: B-HK.04.03.7.03.18.0149 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018-2019
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2018
- Lampiran 3 Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-HK.04.03.72.09.18.2921 tentang Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018
- Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Inspektorat II Tahun 2018
- Lampiran 5 Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat II tahun 2018
- Lampiran 6 Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja per Triwulan Inspektorat II tahun 2018
- Lampiran 7 Pengukuran Kinerja Kegiatan Inspektorat II Tahun 2018
- Lampiran 8 Pengukuran Efisiensi Kegiatan Inspektorat II Tahun 2018
- Lampiran 9 Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Internal Inspektorat II 2018
- Lampiran 10 Sarana dan Prasarana Tahun 2018
- Lampiran 11 Hasil Penilaian PM-Epite Tahun 2018
- Lampiran 12 Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2018
- Lampiran 13 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unit Pelayanan Tahun 2017 dan 2018 (Wilayah Inspektorat II)
- Lampiran 14 Monitoring Status Temuan Audit Inspektorat Badan POM Tahun Audit s.d. Tahun 2018 Per 31 Des 2018
- Lampiran 15 Realisasi Pelatihan Pegawai Inspektorat II Tahun 2018
- Lampiran 16 Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2018

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan *stakeholder*.

Inspektorat Utama Badan POM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Badan POM memiliki kewajiban untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pada setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2018 merujuk kepada Rencana Strategis Inspektorat tahun 2015-2019 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat II tahun 2018.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan

dalam Peraturan Kepala Badan POM no 26 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Inspektorat II sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai perubahan fungsi pengawasan dalam manajemen Badan POM dari *watch dog* menjadi *trusted advisor* yang dapat memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Badan POM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja Badan POM. APIP diharapkan menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi Pemerintah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (audit). Dengan demikian diharapkan semua unit kerja di lingkungan Badan POM tumbuh budaya untuk transparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas.

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Inspektorat Utama dalam melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal harus dapat mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (*controllable*) dan berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasai (*uncontrollable*) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) telah memberikan pandangan bagi Inspektorat II Badan POM bahwa permasalahan yang timbul dari keadaan lingkungan dalam dan luar Inspektorat adalah sebagaimana tertuang dalam tabel yang berisikan kata-kata kunci berikut ini:

Kekuatan ( <i>Strengths - S</i> )	Kelemahan ( <i>Weaknesses - W</i> )
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor dengan Sertifikasi JFA</li> <li>2. Pedoman Operasi Baku/ISO 9001:2015 dan pedoman pengawasan lainnya</li> <li>3. Komitmen pimpinan</li> <li>4. Kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) pada level 3</li> <li>5. Integrasi SPIP dengan Sistem Manajemen Mutu (<i>Quality Management System/QMS</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SDM kurang memadai</li> <li>2. Kompetensi teknis belum merata</li> <li>3. Sumber dana kurang memadai</li> <li>4. Belum adanya sistem informasi pengawasan</li> <li>5. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik</li> </ol>
Peluang ( <i>Opportunities - O</i> )	Ancaman ( <i>Threats - T</i> )
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Political will</i> pemerintah untuk mewujudkan <i>good governance</i> yang mempunyai peran pengawasan dan posisi strategis dalam system manajemen pembangunan nasional yang cukup tinggi</li> <li>2. Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP sebagai mitra auditee menjadikan APIP berperan sebagai <i>trusted advisor</i></li> <li>3. Pemanfaatan satgas SPIP Pusat dan satgas Laporan Keuangan (LK) secara optimal</li> <li>4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah fungsi pengawasan</li> <li>5. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan opini atas Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI</li> <li>2. Mitra kerja yang kurang memahami peran pengawasan internal</li> <li>3. Belum adanya peraturan perundang-undangan terkait pengawasan internal</li> <li>4. Dinamika perubahan dalam sistem manajemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada pembenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, sementara aspek sistem pengawasan masih tertinggal</li> </ol>

Tabel 1.1. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

### Kekuatan (*Strengths - S*)

- **Auditor dengan Sertifikasi JFA**

Pencapaian kinerja dan keberhasilan organisasi pengawasan internal pemerintah sangat dipengaruhi oleh tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan profesional dibidangnya.

SDM yang kompeten dan profesional akan mengatur serta menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang berkompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar profesi pengawasan internal yang berlaku, sedangkan SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan penugasan dengan baik dan memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan, dan dilaksanakan sesuai dengan bidang keahliannya.

- **Pedoman operasi baku/ISO 9001:2015 dan pedoman pengawasan lainnya**

Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat telah didukung dengan pedoman operasional baku/ISO 9001:2015. Disamping itu, berbagai pengawasan internal yang dilaksanakan telah tersedia pedoman pelaksanaannya yang diatur dalam berbagai peraturan. Pelaksanaan audit operasional, review RKAKL, review atas laporan keuangan, evaluasi LAKIP telah tersedia standar pengawasannya, petunjuk pelaksanaan pengawasan internal ataupun pedoman lain yang disusun kementerian teknisnya.

Tersedianya pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan teknis pengawasan akan menjamin konsistensi dan kualitas penyajian laporan hasil pengawasan sehingga rekomendasi, saran dan masukan Inspektorat akan memperoleh pijakan argumentasi yang cukup kuat untuk dapat dipertimbangkan oleh *stakeholder*.

- **Komitmen pimpinan**

Komitmen pimpinan Inspektorat Utama merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan semangat atas pencapaian visi, misi dan tujuan Inspektorat Utama. Komitmen yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Terkait dengan adanya perubahan peranan Inspektorat Utama, maka pimpinan juga diharapkan mampu mengembangkan peran, menjaga proses transformasi, melakukan komunikasi dan menyemangati proses transformasi tersebut.

- **Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi *quality assurance* dan *consultancy* SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3, nilai SPIP Badan POM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen resiko dan SPIP didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.04.01.1.23.08.17.3896 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Resiko di Lingkungan Badan POM.

- **Integrasi SPIP dengan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System/QMS*)**

Sejak diterbitkannya ISO 9001:2015 Badan POM berkomitmen untuk mempertahankan Sertifikat ISO 9001. Badan POM juga melakukan integrasi antara ISO 9001:2015 dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam rangka internalisasi dan penyamaan persepsi terkait integrasi ISO 9001:2015 dengan SPIP Inspektorat Utama Badan POM melaksanakan workshop yang dihadiri oleh perwakilan Auditor Internal dan Manajemen Representatif dari seluruh Unit Kerja di Badan POM.

### **Kelemahan (*Weaknesses –W*)**

- **Jumlah SDM kurang memadai**

Meningkatnya tuntutan akan good governance dan clean government dengan peran aktif dan beban kerja Inspektorat Utama yang semakin meningkat, maka pengawasan akan terlaksana dengan optimal jika didukung jumlah auditor yang memadai. Diharapkan penambahan jumlah auditor dapat segera terwujud.

- **Kompetensi teknis belum merata**

Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme dalam pengawasan internal berhubungan dengan “profesi” auditor maupun harus memenuhi standar kompetensi dalam menjalankan tugasnya.

Namun, efektifitas pelaksanaan pengawasan dapat terhambat apabila auditor tidak memiliki kompetensi teknis ataupun minim pengetahuan dan pengalaman akan bidang penugasannya.

- **Sumber dana kurang memadai**

Pembiayaan APBN untuk kegiatan pengawasan akuntabilitas dan aparatur Negara setiap tahun mengalami peningkatan. Namun peningkatan anggaran tersebut belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pengawasan internal yang akan dilaksanakan.

- **Belum adanya sistem informasi pengawasan**

Pelaksanaan pengawasan internal belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. Masih terdapat peluang untuk membangun sistem informasi pengawasan yang terintegrasi dan terpadu untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal.

- **Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.**

Kebijakan pengawasan berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan berbagai aparat pengawasan agar dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pembenahan manajemen pemerintahan. Aparat pengawasan yang ada pada berbagai level pemerintahan dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan dan koordinasi antara aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan sinergitas pengawasan.

### **Peluang (*Opportunities* – O)**

- ***Political will* pemerintah untuk mewujudkan *good governance* yang mempunyai peran pengawasan dan posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan nasional yang cukup tinggi**

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab terutama dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik dan kepastian atau kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Arah yang diinginkan itu adalah bahwa semua kinerja pemerintahan diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui karya nyata dan berkelanjutan.

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dibuktikan dengan terbitnya berbagai perangkat hukum dan dan serangkaian program seperti Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Program Pengendalian Gratifikasi dan program *Whistleblowing System*.

- **Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP sebagai mitra auditee menjadikan APIP berperan sebagai *trusted advisor***

Penguatan Inspektorat Utama Badan POM sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting untuk dilakukan, sehingga fungsi pengawasan dalam organisasi menjadi efektif dan dapat diandalkan. Auditor intern menjadi mata dan telinga dari pimpinan dan dapat dituntut pula memberikan *early warning system* sebelum terjadinya penyimpangan.

Perkembangan ini selaras dengan paradigma pengawasan intern APIP yang baru dimana APIP harus memperluas peran pengawasan yang telah diembannya dengan memberikan fungsi *assurance* (penjaminan mutu) dan *consulting* (konsultasi) kepada manajemen. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi.

APIP harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

- **Pemanfaatan satgas SPIP Pusat dan satgas Laporan Keuangan (LK) secara optimal**

Pembentukan satgas SPIP dan satgas LK mengacu kepada *best practices konsep three lines of defense* pada organisasi modern untuk meningkatkan pengendalian organisasi. Konsep pengendalian organisasi melalui 3 (tiga) lapis pertahanan terdiri dari:

- Lini pertama merupakan tanggung jawab manajemen operasional untuk menjalankan kebijakan organisasi dengan menjalankan pengendalian intern secara terus menerus dalam seluruh tahapan kegiatan.  
Satgas SPIP dan satgas LK diharapkan mampu untuk memainkan peran pertama dalam konsep *three lines of defense*;
- Lini kedua dibentuk untuk membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan; dan
- Lini ketiga adalah auditor (APIP) yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian intern.

- **Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah fungsi pengawasan**  
Kapabilitas sistem informasi memberi dukungan kepada para pegawai untuk menyempurnakan proses pelaksanaan yang memerlukan umpan balik yang cepat, tepat waktu, dan teliti mengenai produk/jasa yang diberikan. Sistem informasi yang baik adalah sebuah persyaratan penting bagi perusahaan untuk meningkatkan proses bisnis secara berkesinambungan. Tolok ukur kinerja ini dapat berupa tingkat ketersediaan informasi umpan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, dan jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

### **Ancaman (*Threats – T*)**

- **Penurunan opini atas Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI**  
Opini atas Laporan Keuangan Badan POM tahun 2012 yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Nomor 8.1/HP/XIX/05/2013 tanggal 31 Mei 2013 adalah opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini TMP ini diberikan setelah sebelumnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut.

Penurunan opini atas laporan keuangan tersebut telah menurunkan kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan POM. Kejadian serupa dengan pemberian opini TMP dapat kembali terulang apabila tidak terdapat komitmen dan pengelolaan serta pelaporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah.

- **Mitra kerja yang kurang memahami peran pengawasan internal**  
Mitra kerja Inspektorat Utama masih memahami bahwa pengawasan internal merupakan wahana untuk mencari-cari kesalahan. Mitra kerja belum mengetahui dan belum memandang fungsi inspektorat sebagai mitra manajemen untuk memperbaiki kinerja manajemen.
- **Belum adanya perundang-undangan terkait pengawasan internal**  
Pembahasan undang-undang sistem pengawasan internal sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berlarut-larut berimbas pada ketidakpastian atas kelembagaan organisasi pengawas internal dan tidak adanya mekanisme koordinasi yang jelas diantara aparat pengawas internal tersebut.

Sebagai dampak dari ketiadaan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan internal berakibat pada belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.

## B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat II Badan POM dipimpin oleh Inspektur Utama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM, terdiri dari Inspektur, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. SDM Inspektorat II Badan POM terdiri dari 20 orang pegawai dan 4 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan uraian sebagai berikut: Kedudukan Inspektorat II Badan POM secara umum dapat dilihat pada bagan berikut:



**Bagan 1.2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM**

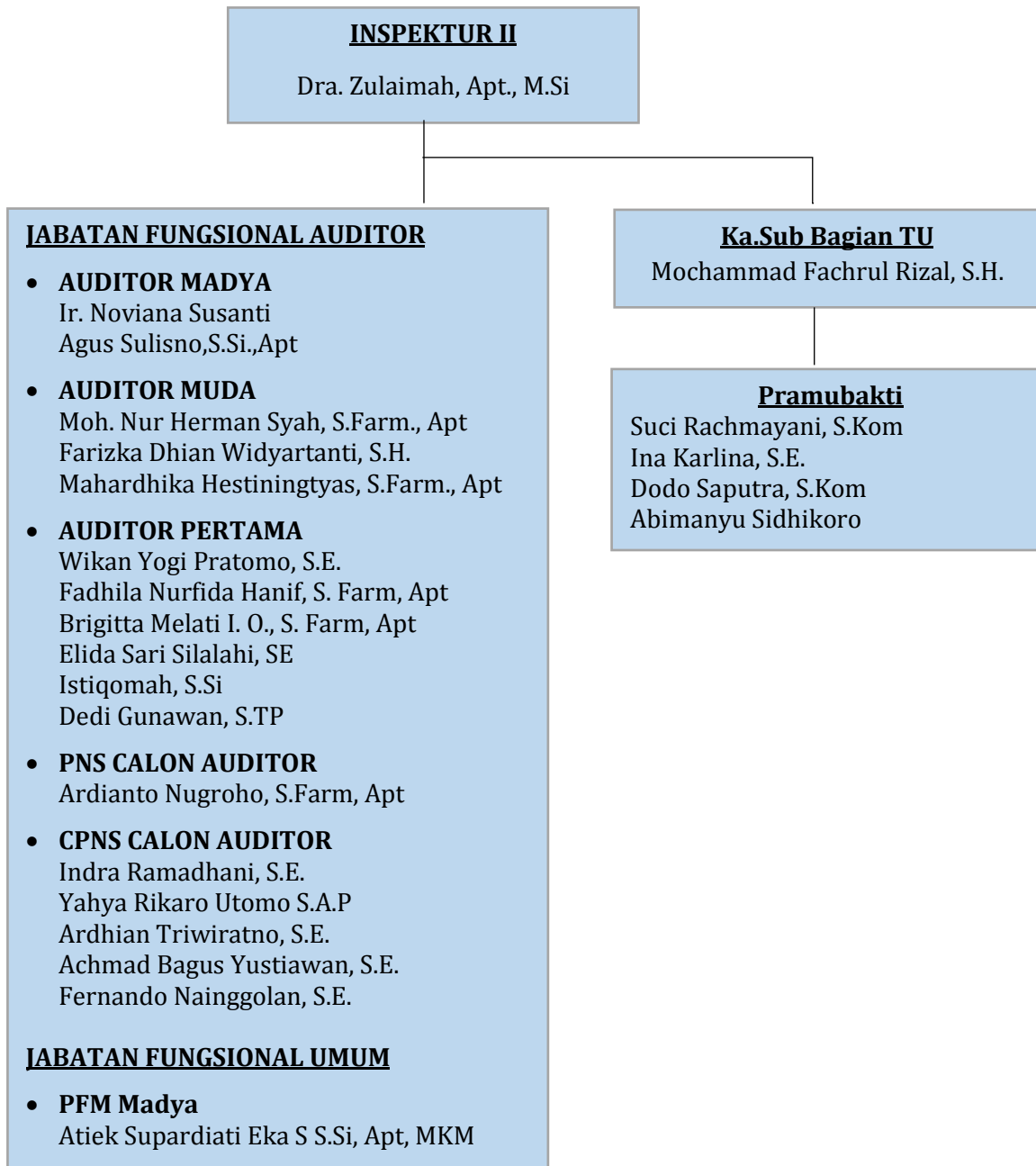
Sebagai bagian dari Inspektorat Utama, Inspektorat II memiliki tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan asli pengawasan
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern
3. Pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
4. Pelaporan hasil pengawasan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II di lingkup:

- Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan kosmetik
- Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
- Deputi Bidang Penindakan
- Inspektorat I
- Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi:
  - Bali
  - Bangka Belitung
  - Banten
  - Bengkulu
  - Sumatera Barat
  - Daerah Istimewa Yogyakarta
  - Jawa Tengah
  - Kalimantan Barat
  - Kalimantan Selatan
  - Kepulauan Riau
  - Maluku
  - Maluku Utara
  - Papua

### **Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat II sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat II Badan POM per Desember tahun 2018 terdiri dari 24 orang pegawai, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini:



**Bagan 1.3. Struktur Organisasi Inspektorat II Badan POM**

Sumber Daya Manusia (SDM) tahun 2018 berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. SDM berdasarkan jabatan

<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Eselon II	1 Orang
Eselon IV	1 Orang
Jabatan Fungsional Auditor	
• Auditor Madya	2 Orang
• Auditor Muda	3 Orang
• Auditor Pertama	6 Orang
Jabatan Fungsional Umum	7 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>20 Orang</b>

2. SDM berdasarkan golongan

<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Golongan III	16 Orang
Golongan IV	4 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>20 Orang</b>

3. SDM berdasarkan pendidikan

<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>Magister</i>	2 Orang
<i>Profesi Apoteker</i>	6 Orang
<i>Ekonomi</i>	6 Orang
<i>Hukum</i>	2 Orang
<i>Kimia</i>	1 Orang
<i>Komputer</i>	1 Orang
<i>Administrasi Publik</i>	1 Orang
<i>Teknologi Pangan</i>	1 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>20 Orang</b>

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

#### I. Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat II mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu **Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa**. Visi Inspektorat II adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat II Badan POM pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Inspektorat II Badan POM. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat sebagai berikut:

**Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat  
dan Daya Saing Bangsa**

#### II. Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat II adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat II. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Inspektorat II menetapkan misi sebagai berikut:

- 1 • Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
- 2 • Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
- 3 • Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Inspektorat II secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

Dengan telah ditetapkan visi misi tersebut, Inspektorat II mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

### III. Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat II Badan POM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat II Badan POM adalah sebagai berikut:



**Bagan 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat II melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat II memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui pengawasan terhadap implementasi Reformasi Birokrasi dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

#### **IV. Sasaran Strategis**

Sasaran Inspektorat II merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dan dialokasikan dalam 2 (dua) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai. Rincian sasaran sebagai berikut:

Tabel Sasaran dan Indikator Januari – Februari 2018 (OTK lama)

No.	Sasaran /Indikator	Definisi Operasional Indikator
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	1. Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebasdari Kesalahan Material
		2. Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja
2.	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB
3.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"
4.	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	1. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan
		2. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu
		3. Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"
5.	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM

No.	Sasaran /Indikator	Definisi Operasional Indikator
		2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat
6.	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	1. Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi Indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi dibandingkan dengan jumlah indikator pada level 3(dari 93 indikator level 3), dengan level 2 sebagai <i>baseline</i>
7.	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	1. Persentase SDM Aparatur Inspektorat yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"
		2. Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan
8.	Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001 Mempertahankan ISO 9001:2008
9.	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat

Tabel 2.2. Definisi Operasional Indikator OTK lama

Tabel Sasaran dan Indikator Maret – Juli dan Agustus – Desember 2018 (OTK baru)

NO	SASARAN / INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan Data berasal dari persentase laporan hasil PM-EPITE dengan kategori minimal BAIK
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan Persentase hasil movev rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan Persentase hasil movev rekomendasi hasil penelusuran pengaduan
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Persentase survei kepuasan pelanggan internal pengawasan intern dengan kriteria minimal "BAIK"
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di- <i>submit</i> secara <i>online</i> Nilai Skala 1 s.d. 12 pada komponen proses penguatan pengawasan oleh Tim Asesor PMPRB. Kegiatan penguatan pengawasan meliputi: a) Pengendalian Gratifikasi; b) Penelusuran Pengaduan Masyarakat; c) Pengendalian Whistleblowing System; d) Penanganan Benturan Kepentingan; e) Pembangunan Zona Integritas; f) Implementasi WBK/WBBM.
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB

NO	SASARAN / INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal
		Persentase jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan
		Persentase monev pelaksanaan rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu
		Persentase pegawai BPOM yang menyampaikan LHKPN tepat waktu
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu
		Persentase pegawai BPOM yang menyampaikan LHKASN tepat waktu
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja
		Dihitung dari kegiatan pengawasan yang dilakukan. Kegiatan pengawasan intern meliputi: a) Audit Operasional; b) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat; c) Evaluasi LAKIP; d) Review Laporan Keuangan; e) Review RKAKL; f) Monev Tindak Lanjut.
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material
		Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern
		Persentase hasil monev rekomendasi hasil pengawasan intern dengan status "SS (Sesuai Saran)"
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP
		Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja oleh Tim Evaluator Inspektorat
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP
		Indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi dibandingkan dengan jumlah indikator pada level 3(dari 93 indikator level 3), dengan level 2 sebagai baseline

Tabel 2.3. Definisi Operasional Indikator OTK baru

## V. Strategi

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus dilakukan antara lain:

1. Memanfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/*stakeholders* terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan;
2. Bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya untuk menunjang keberhasilan pengawasan;
3. Melibatkan peran aktif manajemen dalam Implementasi SPIP dan pemberdayaan satgas SPIP dan Auditor Internal sebagai bagian dari *three lines of defense*;
4. Melibatkan auditor dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan keuangan;
5. Maksimalisasi pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah;
6. Melaksanakan prioritas pengawasan dengan berdasarkan pada *risk-based audit*;
7. Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
8. Mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi untuk mengembangkan mekanisme pengawasan *by report*, *by system* dan *by audit*; dan
9. Meningkatkan kompetensi para auditor melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan berkesinambungan.

## VI. Program

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Badan POM dirangkum dalam Program yaitu:

### Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program diselenggarakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat yang telah ditetapkan sebelumnya. Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi ke dalam Program dan Kegiatan di Inspektorat II adalah:

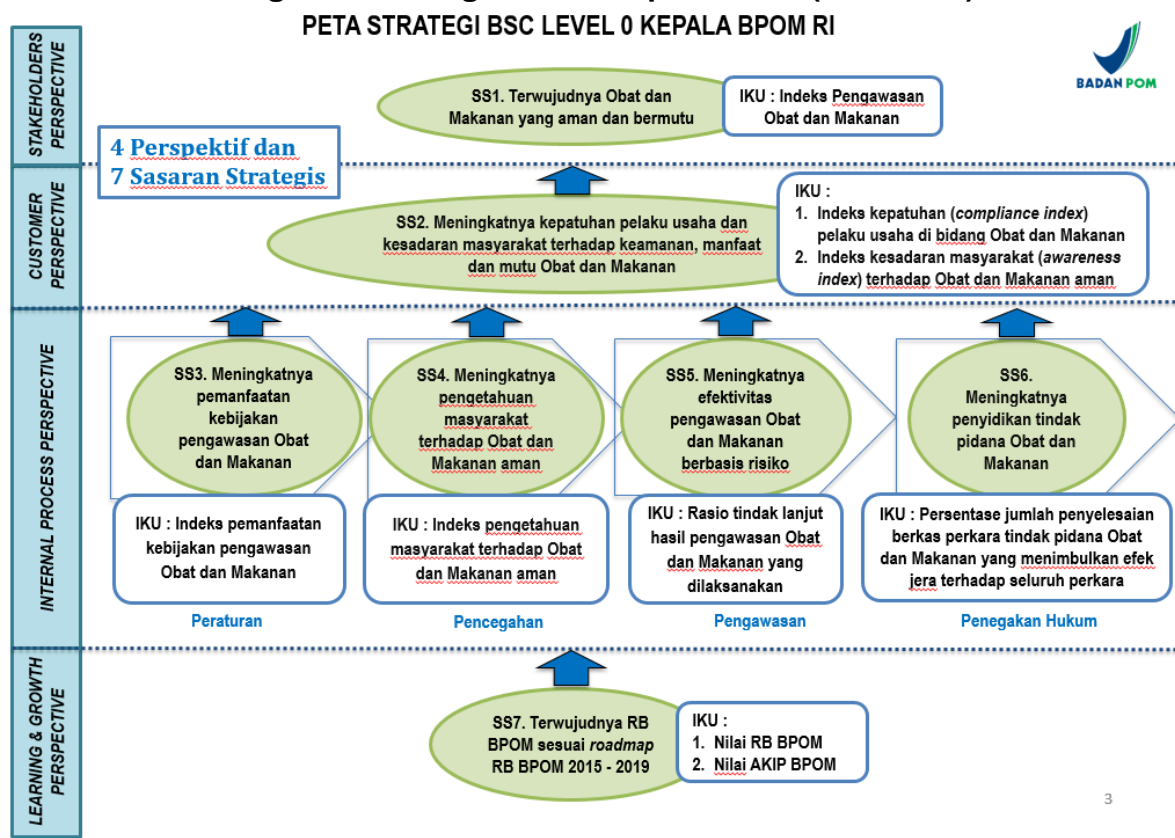
## Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi ke dalam Program dan Kegiatan di Inspektorat (OTK lama)

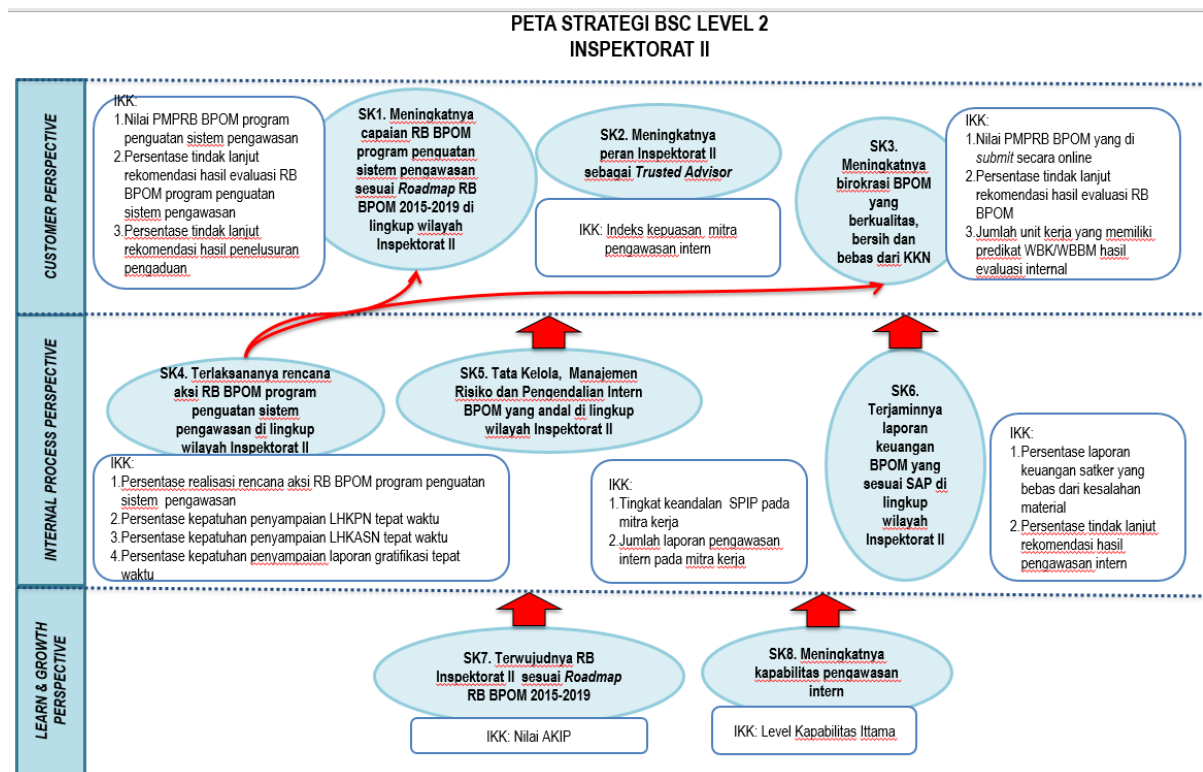
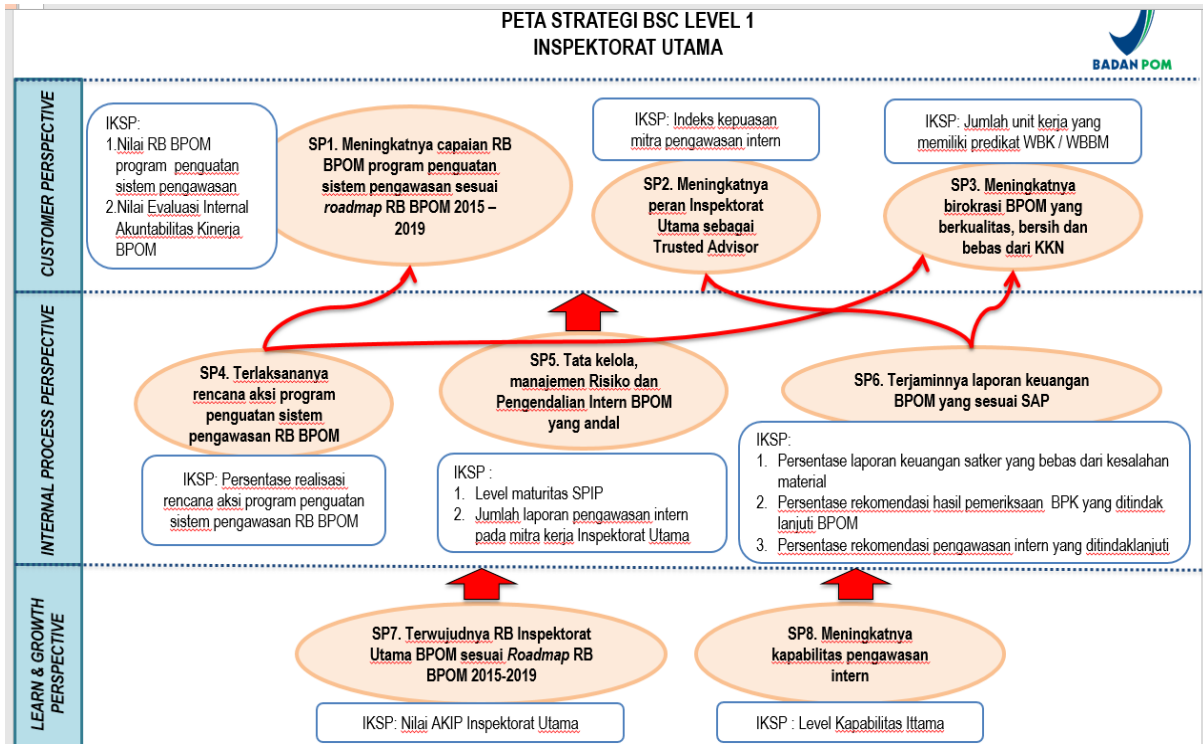
KEPALA BPOM	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2019	
↓	1. Meningkatkan Jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				BPOM IKU
	2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	2. Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM				
↓	PROGRAM	SASARAN HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2019	
↓	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM 2. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK 3. Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN			SEKTAMA IKU
↓	KEGIATAN	SASARAN KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2015	2019	
↓	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan 2. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu			INSPEKTORAT IKU

KEGIATAN	SASARAN KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	TARGET		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2015	2019	
		3. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM 4. Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian interm tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK" 5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat			

Tabel 2.4. Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi ke dalam Program dan Kegiatan di Inspektorat (OTK lama)

### Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi ke dalam Program dan Kegiatan di Inspektorat II (OTK baru)





**Tabel 2.5. Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi ke dalam Program dan Kegiatan di Inspektorat II (OTK baru)**

## B. Rencana Kinerja Tahunan 2018

Inspektorat Badan POM telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2018. Selain itu, Inspektorat Badan POM juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

## C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 diterbitkanlah Peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, dalam pasal 361 s/d 377 dijelaskan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Utama Badan POM, mengatur perubahan Inspektorat yang secara struktural menjadi Inspektorat Utama. Sesuai peraturan tersebut, Inspektorat Utama terdiri dari 2 (dua) unit kerja Eselon II yaitu Inspektorat I dan Inspektorat II.

### 1) Perjanjian Kinerja OTK lama (Januari – Februari 2018)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>			
1	Meningkatnya akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan bebas dari kesalahan material	100%
		Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP unit kerja	73
2	Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana dan RB	Persentase hasil monitoring pencapaian road map RB	75%
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survey kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "Baik"	70%
<b>Internal process perspective</b>			
4	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	10,5
		Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	90%
		Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "Baik"	80%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>			
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Badan POM	84%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat II	76%
6	Meningkatkan kapabilitas manajemen pengawasan intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	40%
7	Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Persentase SDM Aparatur Inspektorat yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%
		Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34
8	Implementasi QMS	Perolehan sertifikat ISO 9001	100%
9	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat	81

## 2) Perjanjian Kinerja OTK baru (Maret – Juli 2018)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,38
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	89%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	88,7
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	70%
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK:13 WBBM:3
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	-
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	99%
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	80%
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	80%
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	-
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	78
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3

### 3) PK OTK baru (Agustus – Desember 2018)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,38
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	89%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara <i>online</i>	89,55
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	70%
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK:13 WBBM:3
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	99%
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	80%
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	80%
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	80
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	78
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3

#### D. Cara Menghitung Capaian Indikator

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja:

Kurang	• $\chi < 75\%$
Cukup	• $75\% \leq \chi < 100\%$
Baik	• $100\%$
Memuaskan	• $100\% < \chi \leq 125\%$
Tidak dapat disimpulkan	• $\chi > 125\%$

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

**Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:**

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

**Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:**

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

#### I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Sehubungan dengan adanya restrukturisasi organisasi dan tata kerja Badan POM tahun 2018, Inspektorat II menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 dibagi dalam 3 (tiga) periode sebagai berikut:

- a. Organisasi dan Tata Kerja lama bulan Januari s.d. Februari 2018 dengan 9 (sembilan) sasaran dan 14 (empat belas) indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dengan rincian:

#### PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT II PERIODE JANUARI - FEBRUARI 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>					
Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebasdari Kesalahan Material	100%	0%	0%	Tidak dapat disimpulkan
	Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	73,00	0	0%	Tidak dapat disimpulkan
Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB	75%	0,0%	0%	Tidak dapat disimpulkan
Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	70%	0,0%	0%	Tidak dapat disimpulkan
<b>Internal Process Control</b>					
Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan*)	10,5	0	0%	Tidak dapat disimpulkan
	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu*)	90%	0%	0%	Tidak dapat disimpulkan
	Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"**)	80%	0,0%	0%	Tidak dapat disimpulkan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM*)	84%	0,0%	0%	Tidak dapat disimpulkan
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat*)	76%	0%	0%	Tidak dapat disimpulkan
Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	40%	0%	0%	Tidak dapat disimpulkan
<b>Learning and Growth Perspective</b>					
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%	0%	0%	Tidak dapat disimpulkan
	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34	0	0%	Tidak dapat disimpulkan
Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	100%	0%	0%	Tidak dapat disimpulkan
Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat	81	0	0%	Tidak dapat disimpulkan

Dari tabel diatas terlihat bahwa 9 (sembilan) sasaran dan 14 (empat belas) indikator tidak dapat disimpulkan karena belum terdapat realisasi selama periode Januari s.d Februari 2018.

- b. Maret s.d. Juli 2018 terdapat 8 (delapan) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dengan rincian:

### PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT II PERIODE MARET - JULI 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>					
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,38	11,38	100%	Baik
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%	100%	111%	Memuaskan

sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%	50%	71%	Cukup
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	81,35	99%	Cukup
Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	89,55	89,55	100%	Baik
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	70%	88,9%	127%	Memuaskan
	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK:13	WBK:13	100%	Baik
		WBBM:3	WBBM:3	100%	Baik
<i>Internal Process Control</i>					
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%	89%	99%	Cukup
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	99%	100%	101%	Memuaskan
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	80%	72,27%	90%	Cukup
	Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	80%	74%	93%	Cukup
Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	80%	92%	115%	Memuaskan
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21	14	67%	Cukup
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	Baik
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%	88,3%	104%	Memuaskan
<i>Learning and Growth Perspective</i>					

Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	78	75,31	97%	Cukup
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Baik

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada periode Maret s.d. Juli 2018 dari 17 (tujuh belas) indikator, 10 (sepuluh) diantaranya mencapai target sedangkan 7 (tujuh) indikator tidak mencapai target.

- c. Agustus s.d. Desember 2018 terdapat 8 (delapan) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dengan rincian:

### PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT II PERIODE AGUSTUS - DESEMBER 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>					
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,38	11,38	100%	Baik
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%	100%	111%	Memuaskan
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%	50%	71%	Cukup
Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	81,35	99%	Cukup
Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	89,55	89,55	100%	Baik
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	70%	89%	127%	Memuaskan
	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK:13	WBK:13	100%	Baik
		WBBM:3	WBBM:3	100%	Baik
<b>Internal Process Control</b>					
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%	90%	100%	Baik

penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	99%	100%	101%	Memuaskan
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	80%	72,27%	90%	Cukup
	Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	80%	66%	83%	Cukup
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	80%	92%	115%	Memuaskan
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21	21	100%	Baik
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	Baik
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%	81,1%	95%	Cukup
<b>Learning and Growth Perspective</b>					
Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	78	75,31	97%	Cukup
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Baik

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada periode Agustus s.d. Desember 2018 dari 17 (tujuh belas) indikator, 11 (sebelas) diantaranya mencapai target sedangkan 6 (enam) indikator tidak mencapai target.

## II. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2016 dan 2017 yang *Not Available* (N/A) karena indikator kinerja tahun 2018 terkait tidak menjadi indikator kinerja tahun 2016 dan 2017 sehingga tidak dapat diukur realisasinya (tidak terdapat sumber data memadai). Penjelasan mengenai masing-masing sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Meningkatnya Capaian RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup Wilayah Inspektorat II

Sasaran ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

- Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan.
- Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan.
- Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan.

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11) = (6)/(10)
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	10,46	11,05	11,38	11,38	100%	108,79%	102,98%	11,5	98,95%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	100%	100%	90%	100%	111%	100%	100%	90%	111,11%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	N/A	N/A	70%	50%	71%	N/A	N/A	75%	66,66%

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

- Kunci keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Nilai PMPRB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan adalah:
  - Komitmen Pimpinan yang kuat mengacu pada peraturan perundang-undangan.
  - Pembentukan Tim RB Badan POM melalui Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.22.03.18.1314 tahun 2018.

- c. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi Reformasi Birokrasi antara lain Kementerian PAN dan RB, BPKP, KPK, Ombudsman dan BPK.
  - d. Melaksanakan rencana aksi sesuai *Road Map* RB Badan POM sesuai Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.24.08.15.4097 tahun 2015.
  - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.
2. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan adalah:
- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Satuan Kerja/Unit Kerja/BB/BPOM dan K/L serta *stakeholder* lainnya.
  - b. Evaluasi Satuan Kerja/Unit Kerja/BB/BPOM yang akan ditetapkan sebagai WBK/WBBM dengan melakukan perbaikan pada komponen yang mendapatkan nilai kurang optimal.
  - c. Intervensi dan verifikasi atas Satuan Kerja/Unit Kerja/BB/BPOM lainnya yang akan diusulkan sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM.
  - d. *Benchmarking* implementasi pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.
3. Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penelusuran Pengaduan tidak mencapai target yang ditetapkan karena pengenaan sanksi hukuman disiplin sedang dalam proses tindak lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam rangka meningkatkan realisasi capaian indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penelusuran Pengaduan, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II antara lain:
- a. Melakukan *desk* pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan bersama Pejabat Pembina Kepegawaian yang dalam hal ini diwakili oleh Biro Umum dan SDM.
  - b. Meningkatkan evaluasi internal atas efektifitas rekomendasi hasil penelusuran pengaduan untuk mendukung implementasi *reward and punishment* di lingkungan Badan POM.

## 2. Meningkatnya Peran Inspektorat II sebagai *Trusted Advisor*

Sasaran ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks kepuasan mitra pengawasan intern.

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11) = (6)/(10)
Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	N/A	84,31	82	81,35	99%	N/A	96,48%	82	99,20%

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

Realisasi capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tidak mencapai target yang ditetapkan karena kurangnya ketepatan tim audit dalam memberikan solusi/pemecahan masalah. Dalam rangka meningkatkan realisasi capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II antara lain:

- Peningkatan kompetensi teknis substantif maupun sertifikasi Auditor.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi antara Auditor dan *Auditee*.

### 3. Meningkatnya Birokrasi BPOM Yang Berkualitas, Bersih dan Bebas Dari KKN

Sasaran ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

- Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara *Online*.
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB BPOM.
- Jumlah Unit Kerja yang Memiliki Predikat WBK/WBBM Hasil Evaluasi Internal.

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11) = (6)/(10)
Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	85,69	88,7	89,55	89,55	100%	104,5%	100,95%	90,5	98,95%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil	71,42%	87,5%	70%	89%	127%	124,61%	101,71%	75	118,66%

evaluasi RB BPOM										
Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK:4	WBK:4	WBK:13	WBK:13	100%	325%	325%	20	65%	
	WBBM:0	WBBM:0	WBBM:3	WBBM:3	100%	300%	300%	4	75%	

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

1. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Nilai PMPRB BPOM yang di-*submit* secara *Online* dan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi RB BPOM adalah:
  - a. Komitmen Pimpinan yang kuat mengacu pada peraturan perundang-undangan.
  - b. Pembentukan Tim RB Badan POM melalui Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.22.03.18.1314 tahun 2018.
  - c. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi Reformasi Birokrasi antara lain Kementerian PAN dan RB, BPKP, KPK, Ombudsman dan BPK.
  - d. Melaksanakan rencana aksi sesuai *Road Map* RB Badan POM sesuai Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.24.08.15.4097 tahun 2015.
  - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.
2. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Jumlah Unit Kerja Yang Memiliki Predikat WBK/WBBM Hasil Evaluasi Internal adalah:
  - a. Pembinaan yang efektif terhadap Unit Kerja dan pegawai pada Unit Kerja yang bersangkutan.
  - b. Pemantauan dan pengawasan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial.
  - c. Evaluasi efektifitas pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
4. **Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan di Lingkup Wilayah Inspektorat II**  
Sasaran ini diukur menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:
  - a. Persentase Realisasi Rencana Aksi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan.
  - b. Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tepat Waktu.

- c. Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN Tepat Waktu.  
d. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Gratifikasi Tepat Waktu.

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11) = (6)/(10)
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	69,68%	88,7%	90%	90%	100%	129,16%	101,46%	92	97,82%
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	N/A	N/A	99%	100%	101%	N/A	N/A	100	100%
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	N/A	70%	80%	72,27%	90%	N/A	103,24%	85	85,02%
	Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	N/A	N/A	80%	66%	83%	N/A	N/A	85	77,64%

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

1. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase Realisasi Rencana Aksi RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan adalah:
  - a. Tindak lanjut *Road Map* RB Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015.
  - b. Perubahan mekanisme kerja, *mind set* dan *culture set* pegawai secara sistematis dan konsisten menjadi lebih baik.
  - c. Peningkatan efektifitas proses manajemen internal organisasi melalui restrukturisasi organisasi dan tata kerja yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan SPIP.
  - d. Pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan publik serta deregulasi (simplifikasi pelayanan publik).

2. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tepat Waktu adalah:

- a. Komitmen Pimpinan yang kuat mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- b. Tingginya tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara/Wajib Laport dalam menyampaikan LHKPN tepat waktu.

Realisasi pencapaian target indikator kinerja Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tepat Waktu tingkat Badan POM adalah 100%.

3. Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN Tepat Waktu tidak mencapai target yang ditetapkan karena:

- a. Koordinasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan kepatuhan penyampaian LHKASN belum optimal.
- b. Pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Penyelenggara Negara/Wajib Laport belum efektif.

Dalam rangka meningkatkan realisasi capaian indikator kinerja Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN Tepat Waktu, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II antara lain:

- a. Melakukan *desk* pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN bersama dengan Biro Umum dan SDM selaku administrator pengelolaan LHKASN.
- b. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan kepatuhan penyampaian LHKASN.

Realisasi pencapaian target indikator kinerja Persentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN Tepat Waktu tingkat Badan POM adalah 80%

4. Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Gratifikasi Tepat Waktu tidak mencapai target yang ditetapkan karena:

- a. Belum seluruh pegawai mengetahui adanya tenggat waktu penyampaian laporan gratifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Kurangnya pemahaman penerima gratifikasi mengenai pedoman pengendalian gratifikasi yang wajib dilaporkan.

Dalam rangka meningkatkan realisasi capaian indikator kinerja Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Gratifikasi Tepat Waktu, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II antara lain:

- a. Sosialisasi penyampaian laporan gratifikasi melalui aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL) dengan mengundang narasumber dari KPK.
- b. Merevisi Peraturan Kepala Badan POM No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan POM yang dituangkan dalam Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2018 yang mana struktur Unit Pengendalian Gratifikasi disesuaikan dengan organisasi dan tata kerja Badan POM yang baru sesuai Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan POM, Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dan Peraturan Badan POM No. 12

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan POM.

Realisasi pencapaian target indikator kinerja Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Gratifikasi Tepat Waktu tingkat Badan POM adalah 64,79%

#### 5. Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang Andal di Lingkup Wilayah Inspektorat II

Sasaran ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- Tingkat Keandalan SPIP pada Mitra Kerja.
- Jumlah Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja.

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11) = (6)/(10)
Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	90,85	95,46	80%	92%	115%	101,26%	96,37%	85	108,23%
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	18	19	21	21	100%	116,66%	110,52%	23	91,30%

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

- Kunci keberhasilan pencapaian target indikator Tingkat Keandalan SPIP pada Mitra Kerja adalah:
  - Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.1.23.11.15.5259 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan POM.
  - Melakukan pemantauan terhadap efektifitas penerapan pengendalian intern, yang dimaksudkan untuk memastikan efektifitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan. Pemantauan dilaksanakan terhadap penerapan unsur-unsur pengendalian intern secara umum di tingkat entitas dan tingkat kegiatan yang dipilih pada pemantauan pengendalian utama.

- c. Melakukan pengendalian utama berdasarkan pertimbangan faktor risiko yaitu Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengelolaan Barang Persediaan.
  - d. Pemanfaatan SDM yang profesional, penguatan kelembagaan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai
2. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja adalah adanya komitmen internal Inspektorat II dalam pemenuhan penyelesaian laporan hasil pengawasan dan kerja sama dari berbagai pihak (Unit Kerja/BB/BPOM maupun instansi terkait lainnya) sehingga penyusunan laporan dapat dilakukan dengan lancar dan terselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

## 6. Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM yang sesuai SAP di Lingkup Wilayah Inspektorat II

Sasaran ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase Laporan Keuangan Satker yang Bebas Dari Kesalahan Material.
- b. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern.

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11) = (6)/(10)
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	88,99%	73,96%	85%	81,1%	95%	91,13%	109,65%	87%	93,21%

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

1. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator Persentase Laporan Keuangan Satker yang Bebas dari Kesalahan Material adalah:
  - a. Teknik rewiu yang dilakukan oleh Inspektorat II baik untuk rewiu Laporan Keuangan, Rewiu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) dan Rewiu

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu kepada pedoman reuiu yang termutakhir.

- b. Penguatan peran Tim Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - c. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BPKP, terutama dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan dan pelaksanaan reuiu sehingga kredibilitas Badan POM dapat terus terjaga.
2. Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern tidak mencapai target yang ditetapkan karena:
- a. Satuan Unit Kerja/BB/BPOM kurang memahami rekomendasi sehingga tindak lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti.
  - b. Meningkatnya peran Inspektorat II dalam fungsi pengawasan secara luas, namun belum didukung jumlah sumber daya yang memadai.
  - c. Pelaksanaan tindak lanjut Unit Kerja/BB/BPOM yang melibatkan pihak ketiga banyak mengalami kendala baik berupa administratif maupun denda keterlambatan.
  - d. Terdapat hasil pemeriksaan dengan status tindak lanjut Belum Sesuai Saran (BSS) yang disebabkan faktor dari eksternal Unit Kerja/BB/BPOM terkait.

Dalam rangka meningkatkan realisasi capaian indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II adalah pemantauan/evaluasi TL atas laporan hasil audit Inspektorat II dengan tujuan untuk mengevaluasi progress tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan kerja/unit pelaksana, evaluasi dilaksanakan dalam bentuk menegaskan kembali apakah rekomendasi yang diberikan sudah ditindaklanjuti atau belum.

## 7. Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019

Sasaran ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai AKIP.

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11) = (6)/(10)
Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	72,06	74,73	78	75,31	97%	104,51%	100,77%	81	96,29%

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

Realisasi capaian indikator kinerja Nilai AKIP tidak mencapai target yang ditetapkan karena:

- a. Dokumen perencanaan Rencana Strategis telah memuat tujuan yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) namun belum disertai dengan target indikator.
- b. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai dan belum mengimplementasikan pemantauan kinerja secara berkelanjutan dan berjenjang serta menunjang penerapan manajemen kinerja.
- c. Terdapat nilai indikator yang capaiannya masih dibawah capaian tahun sebelumnya.
- d. Pelaksanaan sistem evaluasi internal belum sepenuhnya mampu memberikan evaluasi yang berkualitas dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang.
- e. Hasil evaluasi belum disajikan di dalam laporan AKIP sebagai umpan balik bagi penyempurnaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Dalam rangka meningkatkan realisasi capaian indikator kinerja Nilai AKIP, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat II adalah:

- a. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang up to date, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Menyempurnakan penyajian informasi perihal pengukuran kinerja, utamanya dengan memberi penekanan pada mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur, dan penyajian perhitungan efisiensi per *output/outcome*.
- c. Menyusun penyelarasan kinerja secara berjenjang/*cascading* dengan baik sampai dengan level individu dan menguatkan komitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
- d. Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
- e. Melengkapi data capaian kinerja dengan disertai justifikasi/penjelasan tentang hambatan pencapaian target atau adanya penurunan realisasi dari tahun sebelumnya dan upaya perbaikan yang akan/telah dilakukan.

## 8. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Sasaran ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Level Kapabilitas APIP.

Sasaran	Indikator	Realisasi 2016	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 terhadap 2016 (%)	Realisasi 2018 terhadap 2017 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2018 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11) = (6)/(10)
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	100%	150%	100%	Level 3	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

Kunci keberhasilan pencapaian target indikator Level Kapabilitas APIP adalah:

- Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun berdasarkan prioritas risiko dan kebutuhan manajemen serta stakeholder lainnya. PKPT telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Utama Badan POM Nomor B-PI.01.01.7.73.04.18.0157 tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2018.
- Melakukan pengawasan berdasarkan Standar Audit dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memperhatikan risiko organisasi.
- SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas dalam menjalankan fungsi pengawasan internal.

## B. Pencapaian Realisasi Kinerja Terhadap Target 2019

Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2016 dan 2017 yang *Not Available* (N/A) karena indikator kinerja tahun 2018 terkait tidak menjadi indikator kinerja tahun 2016 dan 2017 sehingga tidak dapat diukur realisasinya (tidak terdapat sumber data memadai).

Adapun capaian masing-masing indikator kinerja Inspektorat II pada tahun 2016, 2017 dan 2018 bila dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada Renstra tahun 2019 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

No.	Sasaran	Indikator	Target Renstra 2019	2016		2017		2018	
				Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (7)/(4)	(9)	(10) = (9)/(4)
1	Meningkatnya capaian RB BPOM	Nilai PMPRB BPOM program	11,5	10,46	91%	11,05	96%	11,38	99%

No.	Sasaran	Indikator	Target Renstra 2019	2016		2017		2018	
				Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019
	program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	penguatan sistem pengawasan							
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%	100%	111%	100%	111%	100%	111%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	75%	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	67%
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	N/A	N/A	84,31	103%	81,35	99%
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	90,5	85,69	95%	88,7	98%	89,55	99%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	75%	71,42%	95%	87,50%	117%	89%	118%
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	20	WBK:4	N/A	WBK:4	N/A	WBK:13	N/A
			4	WBBM:0	N/A	WBBM:0	N/A	WBBM:3	N/A
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%	69,68%	76%	88,70%	96%	90%	98%

No.	Sasaran	Indikator	Target Renstra 2019	2016		2017		2018	
				Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019	Realisasi	% realisasi thdp target 2019
	wilayah Inspektorat II	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	85%	N/A	N/A	70%	82%	72,27%	85%
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	66%	78%
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	85%	90,85	10688%	95,46%	112%	92%	108%
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	18	78%	19	83%	21	91%
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	87%	88,99%	102%	73,96%	85%	81,1%	93%
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	81	72,06	89%	74,73	92%	75,31	92%
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	66,66%	Level 3	100%	Level 3	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa beberapa realisasi indikator telah melebihi target Renstra tahun 2019 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2019 untuk indikator pada sasaran ‘Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang Andal di lingkup Wilayah Inspektorat II’ pada indikator sasaran “Jumlah Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja” dengan memperhatikan *baseline* data hasil capaian indikator tahun 2018

### C. Realisasi Anggaran

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat II selama tahun 2018 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat II secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat II Badan POM dengan KPPN setempat.

Penyerapan anggaran Inspektorat II tahun 2018 untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar 93,86% dari jumlah keseluruhan pagu (Rp.6.129.887.000) dengan rincian sebagai berikut:

Target		Realisasi		Persentase (%)	
Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran
35	6.129.887.000	35	5.753.768.718	100%	93,86%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>							
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,38	11,38	100%	193.570.000	178.301.368	92,11%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%	100%	111%			
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%	50%	71%			
Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	81,35	99%	265.430.000	247.072.319	93,08%
Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	89,55	89,55	100%	963.620.000	816.790.610	84,76%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	70%	89%	127%			
	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK:13 WBBM : 3	WBK:13 WBBM : 3	100%			
<b>Internal Process Control</b>							
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%	90%	100%	134.635.000	124.891.780	92,76%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	99%	100%	101%			
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	80%	72%	90%			
	Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	80%	66%	83%			
Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	80%	92%	115%	1.400.702.000	1.298.066.768	92,67%
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21	21	100%	788.375.000	785.715.248	99,66%
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	59.960.000	54.729.100	91,28%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%	81%	95%	429.725.000	402.486.651	93,66%
<b>Learning and Growth Perspective</b>							
Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	78	75,31	97%	108.050.000	103.715.900	95,99%
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	1.785.820.000	1.741.998.974	97,55%
					<b>6.129.887.000</b>	<b>5.753.768.718</b>	<b>93,86%</b>

## D. Analisis Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Berdasarkan perhitungan pengukuran efisiensi kegiatan Inspektorat, diperoleh informasi sebagai berikut:

Kategori Efisiensi	Jumlah Kegiatan
<b>Ekstrem Efisien (TE &gt; 0,5)</b>	<b>1</b>
<b>Efisien</b>	<b>27</b>
<b>Tidak Terealisasi</b>	<b>8</b>

1. Terdapat beberapa kegiatan dengan indeks efisiensi di atas 1,50 sehingga memiliki tingkat efisiensi lebih dari 0,5 yaitu Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan (Inspektorat II). Tingkat efisiensi yang tinggi ini disebabkan penganggaran komponen mempertimbangkan arah kebijakan pimpinan dan memperhatikan berbagai jenis risiko yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.
2. Sebanyak 28 (dua puluh delapan) kegiatan yang telah terealisasi dinyatakan efisien.
3. Terdapat 8 (delapan) kegiatan yang tidak terealisasi yaitu:
  - a. Administrasi Keuangan
  - b. Pengadaan Alat Pengolahan Data
  - c. Diseminasi Pra Audit Internal ISO 9001:2015
  - d. Audit Internal/Surveilan QMS/RTM Inspektorat II ISO 9001:2015
  - e. Pelatihan Sertifikasi Auditor
  - f. Pelatihan/Workshop/Meeting Auditor
  - g. Pelatihan kantor sendiri
  - h. Penyusunan majalah infowas

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas tidak terealisasi karena adanya revisi anggaran OTK baru yang ditetapkan pada bulan Juli tahun 2018.

Selain itu untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran, juga dilakukan perhitungan terhadap efisiensi per sasaran strategis sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	92,11%	94%	1,02	1,00	0,02	Efisien
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	93,08	99%	0,01	1,00	-0,99	Tidak Efisien
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	84,76%	107%	1,26	1,00	0,26	Efisien
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	92,76%	93%	1,00	1,00	0,00	Efisien
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	96,00%	134%	1,40	1,00	0,40	Efisien
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	92,00%	98%	1,07	1,00	0,07	Efisien
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	95,99%	96%	1,00	1,00	0,00	Efisien
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	97,55%	100%	1,03	1,00	0,03	Efisien

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tahun 2018 adalah tahun keempat dalam implementasi Rencana Strategis 2015-2019 Inspektorat. Pengawasan fungsional yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat II membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kapabilitas dan keahliannya.

Pada tahun 2018, terdapat beberapa keberhasilan besar Inspektorat II Badan POM, antara lain:

- a. Peningkatan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan menjadi 100%;
- b. Peningkatan persentase kepatuhan LHKPN di BPOM tepat waktu menjadi 100%;
- c. Peningkatan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM menjadi 89%;
- d. Peningkatan persentase keandalan SPIP pada mitra kerja;
- e. Peningkatan level kapabilitas APIP melalui skema *Internal Audit Capability Model* (IACM) menjadi level 3;
- f. Integrasi manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan Manajemen Risiko.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa **secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja 2018 dan Perjanjian Kinerja 2018 dapat dicapai.**

Sebagaimana yang telah dipaparkan di awal, Inspektorat II telah melaksanakan program dalam rangka mencapai tujuan strategis, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur Badan POM.

Namun demikian, masih terdapat pencapaian 3 (tiga) sasaran yang belum optimal yaitu:

- 1) **Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II.** Kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:
  - a. Sistem pengukuran kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. Perhitungan realisasi dan capaian kinerja masih dilakukan secara manual sehingga belum dapat menjamin validitas data kinerja.

- b. Koordinasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan kepatuhan penyampaian LHKASN belum optimal.
  - c. Pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Penyelenggara Negara/Wajib Laport belum efektif.
  - d. Belum seluruh pegawai mengetahui adanya tenggat waktu penyampaian laporan gratifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
  - e. Kurangnya pemahaman penerima gratifikasi mengenai pedoman pengendalian gratifikasi yang wajib dilaporkan.
- 2) **Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II.** Kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah proses pengenaan rekomendasi/sanksi hukuman disiplin sedang dalam proses tindak lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 3) **Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019.** Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah:
- a. Dokumen perencanaan Rencana Strategis telah memuat tujuan yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) namun belum disertai dengan target indikator.
  - b. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai dan belum mengimplementasikan pemantauan kinerja secara berkelanjutan dan berjenjang serta menunjang penerapan manajemen kinerja.
  - c. Pelaksanaan sistem evaluasi internal belum sepenuhnya mampu memberikan evaluasi yang berkualitas dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang.
  - d. Hasil evaluasi belum disajikan di dalam laporan AKIP sebagai umpan balik bagi penyempurnaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja.
  - e. Belum adanya pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja *yang up to date* dan pedoman atau SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terdapat berbagai kendala dan hambatan, terutama menyangkut:

- Penyesuaian atas perubahan SOTK lama ke SOTK baru yaitu dari unit Eselon II menjadi Unit Eselon I.
- Penambahan peran Inspektorat dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di Lingkungan Badan POM seperti Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB),
- Koordinator Auditor Internal QMS, dan
- Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai dalam melaksanakan fungsi pengawasan di seluruh satuan kerja Badan POM dan
- Untuk melaksanakan seluruh peran tersebut, merupakan tantangan bagi segenap personil Inspektorat.

Tantangan tersebut dapat diminimalisasi melalui pembagian tugas pada masing-masing kegiatan, peningkatan kapasitas, optimalisasi peran personil dan efisiensi waktu dalam pelaksanaan tugas.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2018, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Langkah dalam rangka mempertahankan capaian
  - a. Melakukan kaji ulang dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Mutu (QMS) Inspektorat dengan berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang tersedia melalui partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - b. Memperkuat mekanisme monitoring temuan hasil audit beserta tindak lanjutnya.
  - c. Mengintensifkan upaya sosialisasi dan edukasi terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh aparaturnegara.
2. Langkah dalam rangka meningkatkan capaian
  - a. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian kinerja sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja serta adanya pembagian personil sebagai penanggung jawab dalam pencapaian target kinerja.
  - b. Perlu dilakukan reviu terhadap indikator kinerja dan penentuan dasar penetapan target didasarkan pada *baseline* data yang telah ada.
  - c. Perlu segera membentuk satgas/komite audit yang bertugas melakukan pengawasan/reviu kegiatan pengawasan APIP untuk meningkatkan pencapaian pada sasaran ke-6, yaitu meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern.

3. Langkah-langkah lain apabila diperlukan
  - a. Melakukan pemantauan pada hasil pengawasan yang dilakukan berdasarkan hasil pengaduan.
  - b. Revisi terhadap target indikator sasaran 2 “Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana, dan RB” dengan memperhatikan *baseline* data hasil capaian indikator tahun 2017 dimana target RPJMN 2019 telah tercapai di tahun 2017
  - c. Revisi terhadap indikator sasaran 5 “Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien”
    - 1) Indikator 1: Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan sebaiknya dilakukan penyesuaian target dengan memperhatikan *baseline* data hasil capaian indikator tahun 2017 dibandingkan dengan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan oleh Kementerian PAN dan RB dimana target RPJMN 2019 telah tercapai di tahun 2017
    - 2) Indikator 2: Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Tepat Waktu sebaiknya dilakukan penyesuaian target menjadi 100% untuk setiap tahunnya dikarenakan Laporan Hasil Pengawasan merupakan output dari kegiatan pengawasan yang digunakan Pimpinan Organisasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
    - 3) Indikator 3: Persentase Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) dengan Kriteria “Baik”  
Sebaiknya direvisi menjadi: Persentase Evaluasi Inspektorat atas Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) dengan Kriteria “Baik”

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2018 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholder* dan menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

**LAMPIRAN**

## Lampiran 1



# **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726  
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR : B-HK.04.03.7.03.18. 0149**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2018-2019**

**INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Utama tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2018-2019.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama menjadi landasan dalam melaksanakan peran pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk masa tahun 2018-2019;
- Kedua : Indikator Utama sebagaimana dimaksud dictum kedua terdiri dari 3 (tiga) lampiran, yaitu :
- a. Lampiran 1 : Indikator Utama Inspektorat Utama
  - b. Lampiran 2 : Indikator Utama Inspektorat I
  - c. Lampiran 3 : Indikator Utama Inspektorat II



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuitamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

- Kedua : Indikator Kinerja Utama menjadi acuan untuk menetapkan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja (Lapkin) Satuan Kerja dan Unit Kerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2018-2019;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 29 Maret 2018

Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Inspektur Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726  
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

### LAMPIRAN I

Keputusan Inspektur Utama Badan POM

No : B-HK.04.03.7.03.18.

Tanggal : Maret 2018

1. Nama Unit Organisasi : **Inspektorat Utama  
Badan Pengawas Obat dan Makanan**
2. Tugas : Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Fungsi :
  1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
  2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
  4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
  5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama

## Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan
		Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM
2.	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern
3.	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
4.	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM
5.	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama
6.	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan material
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

7.	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama
8.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 29 Maret 2018  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Inspektur Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

## LAMPIRAN II

Keputusan Inspektur Utama Badan POM

No : B-HK.04.03.7.03.18.

Tanggal : Maret 2018

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat I  
Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.
3. Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat I;
  - b. Penyusunan rencana program pengawasan intern pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat I;
  - c. Pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat I;
  - d. Pelaporan hasil pengawasan; dan
  - e. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

**Indikator Kinerja Utama Inspektorat I:**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan
2.	Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern
3.	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan
4.	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja
5.	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti
6.	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 29 Maret 2018

Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Inspektur Utama,



Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

**LAMPIRAN III**

Keputusan Inspektur Utama Badan POM

No : B-HK.04.03.7.03.18.

Tanggal : Maret 2018

1. Nama Unit Organisasi : **Inspektorat II  
Badan Pengawas Obat dan Makanan**
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Inspektorat I, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
3. Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat II;
  - b. Penyusunan rencana program pengawasan intern pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat II;
  - c. Pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat II;
  - d. Pelaporan hasil pengawasan; dan
  - e. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

## Indikator Kinerja Utama Inspektorat II:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan system pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015 – 2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan system pengawasan
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan system pengawasan
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan
2.	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai trusted advisor	Indesk kepuasan mitra pengawasan intern
3.	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal
4.	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan system pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan system pengawasan
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu
5.	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja
6.	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker bebas dari kesalahan material
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726  
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuitamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

7.	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP
8.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 29 Maret 2018  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Inspektur Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si



## Lampiran 2



# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139  
Email : infopom@indo.net.id, tuinspektorat2bpom@gmail.com; Website : www.pom.go.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Zulaimah, Apt.,M.Si  
Jabatan : Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si  
Jabatan : Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Jakarta, 7 September 2018

Pihak Pertama,

Dra. Zulaimah, Apt.,M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**INSPEKTORAT BADAN POM**  
 Periode : Januari – Februari 2018

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebasdari Kesalahan Material	100%
		Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	73,00
2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB	75%
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	70%
4	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan*)	10,5
		Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu*)	90%
		Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK")	80%
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM*)	84%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat*)	76%
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	40%
7	Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%
		Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34
8	Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	100%
9	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat	81

Kegiatan  
 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas  
 Aparatur Badan POM

Pihak Kedua,



Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Anggaran  
 Rp 7.152.902.000

Jakarta, September 2018  
 Pihak Pertama,



Dra. Zulaimah, Apt.,M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
 INSPEKTORAT II BADAN POM  
 Periode : Maret – Juli 2018**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,38
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	89%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	89,55
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	70%
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK:13 WBBM:3
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	99%
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	80%
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	80%
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	80
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	78
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	level 3

Kegiatan  
 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas  
 Aparatur II

Anggaran  
 Rp 6.129.887.000

Pihak Kedua,

Jakarta, September 2018  
 Pihak Pertama,



Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si



Dra. Zulaimah, Apt.,M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
 INSPEKTORAT II BADAN POM  
 Periode : Agustus – Desember 2018**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,38
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	89%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	89,55
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	70%
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK:13 WBBM:3
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	99%
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	80%
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	80%
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	80
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	78
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	level 3

Kegiatan  
 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas  
 Aparatur II

Anggaran  
 Rp 6.129.887.000

Pihak Kedua,

Jakarta, September 2018  
 Pihak Pertama,



Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si



Dra. Zulaimah, Apt.,M.Si



## **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139  
Email : infopom@indo.net.id, tuinspektorat2bpom@gmail.com; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN  
INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR B-HK.04.03.72.09.18.2921  
TENTANG  
RENCANA KINERJA TAHUNAN  
INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2018**

**INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan; dan  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);  
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;  
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);  
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);  
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);  
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139  
Email : infopom@indo.net.id, tuinspektorat2bpom@gmail.com; Website : www.pom.go.id

9. Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-HK.04.03.72.09.18.2919 tentang Rencana Strategis Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2018.
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 7 September 2018  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Inspektur II

Dra. Zulaimah, Apt, M.Si

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
 INSPEKTORAT II BADAN POM  
 TAHUN 2018**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
<b>Customer Prespective</b>			
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	1.1. Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,38
		1.2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	89%
		1.3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai <i>Trusted Advisor</i>	2.1 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	3.1 Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	89,55
		3.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	70
		3.3 Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK:13 WBBM:3
<b>Internal Proses Prespective</b>			
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	1.1. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%
		1.2. Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	99%
		1.3. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	80%
		1.4. Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	80%
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	1.1. Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	80
		1.2. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	1.1. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
		1.2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%
<b>Learn &amp; Growth Prespective</b>			
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	7.1. Nilai AKIP	78
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	7.2. Level Kapabilitas APIP	level 3

Jakarta, 7 September 2018  
 Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 Inspektur II



Dra. Zulaimah, Apt., M.Si

**PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT II  
TAHUN 2018  
PERIODE JANUARI - FEBRUARI 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>				
Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebasdari Kesalahan Material	100%	0%	0%
	Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	73,00	0	0%
Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB	75%	0,0%	0%
Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	70%	0,0%	0%
<b>Internal Process Control</b>				
Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan*)	10,5	0	0%
	Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu*)	90%	0%	0%
	Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"*)	80%	0,0%	0%
Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM*)	84%	0,0%	0%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat*)	76%	0%	0%
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Nilai Pencapaian Sasaran (%)</b>

Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	40%	0%	0%
<b>Learning and Growth Perspective</b>				
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM)	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%	0%	0%
	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34	0	0%
Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	100%	0%	0%
Meningkatkan akuntabilitas	Nilai SAKIP Inspektorat	81	0	0%

**PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT II  
TAHUN 2018  
PERIODE MARET - JULI 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>				
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,38	11,38	100%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%	100%	111%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%	50%	71%
Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	81,35	99%
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
Meningkatnya birokrasi BPOM	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	89,55	89,55	100%

yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	70%	88,9%	127%
	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK:13	WBK:13	100%
		WBBM:3	WBBM:3	100%
<b>Internal Process Control</b>				
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%	89%	99%
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	99%	100%	101%
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	80%	72,27%	90%
	Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	80%	74%	93%
Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	80%	92%	115%
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21	14	67%
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%	88,3%	104%
<b>Learning and Growth Perspective</b>				
Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	78	75,31	97%
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

**PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT II  
TAHUN 2018  
PERIODE AGUSTUS - DESEMBER 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>				
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	11,38	11,38	100%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%	100%	111%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	70%	50%	71%
Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	81,35	99%
Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	89,55	89,55	100%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	70%	89%	127%
	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK:13	WBK:13	100%
		WBBM:3	WBBM:3	100%
<b>Internal Process Control</b>				
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%	90%	100%
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	99%	100%	101%
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	80%	72,27%	90%
	Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	80%	66%	83%
Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	80%	92%	115%
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21	21	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	85%	81,1%	95%
<b><i>Learning and Growth Perspective</i></b>				
Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	78	75,31	97%
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

## Lampiran 5

### CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT II

TAHUN 2018

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2018	Capaian 2018	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
				Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>										
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Nilai PMPRB BPOM dari komponen pengungkit penguatan sistem pengawasan	Hasil Nilai PMPRB BPOM pengungkit penguatan sistem pengawasan	11,38		11,38	11,38	11,38	100%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti hasil evaluasi RB BPOM	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti				90%	100%	111%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	Hasil tindak lanjut rekomendasi	70%		50	70%	50%	71%
	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Persentase Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	Rekapitulasi Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	82		81,35	82	81,35	99%
	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	Nilai PMPRB didapat dari penjumlahan antara komponen	Hasil Nilai PMPRB				89,55	89,55	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2018	Capaian 2018	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	
				Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)	
			pengungkit dan komponen hasil								
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Rekap Rekomendasi				70%	89%	127%	
		Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	Jumlah nilai bobot pada komponen pengungkit	Hasil nilai bobot pada komponen pengungkit	13		13	WBK:13	WBK:13	100%	
					3		3	WBBM:3	WBBM:3	100%	
<b>Internal Process Perspective</b>											
	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Jumlah realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	90%		90%	90%	90%	100%	
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	Jumlah PN/WL wajib LHKPN yang melapor tepat waktu	Rekapitulasi data PN/WL wajib LHKPN					99%	100%	101%
		Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	Jumlah PN/WL wajib LHKASN yang melapor tepat waktu	Rekapitulasi data PN/WL wajib LHKASN					80%	72%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2018	Capaian 2018	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
				Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
		Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	Jumlah pelaporan gratifikasi yang tepat waktu	Akumulasi pelaporan gratifikasi				80%	66%	83%
	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	Nilai rata-rata PM-EPITE unit kerja yang telah diverifikasi oleh APIP	Nilai rata-rata PM-EPITE terverifikasi				80%	92%	115%
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	Presentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja	Laporan pengawasan intern pada mitra kerja	21	21	21	21	100%	
	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	Jumlah satker/unit kerja yang bebas dari kesalahan material	Rekapitulasi jumlah satker/unit kerja yang bebas dari kesalahan material	100%		100%	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Total rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%		81%	85%	81%	95%
<i>Learning and Growth Perspective</i>										

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Pembilang		Penyebut		Target 2018	Capaian 2018	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
				Definisi	Realisasi	Definisi	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)/(8)	(11) = (10)/(9)
	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	Hasil evaluasi dari sumber data yang diperoleh sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Evaluasi dari sumber data yang diperoleh sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.				78	75,31	97%
	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	100%

## Lampiran 5

### CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PER TRIWULAN INSPEKTORAT II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7)/(6)	(12) = (8)/(6)	(13) = (9)/(6)	(14) = (10)/(6)
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>													
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Nilai PMPRB BPOM program penguatan sistem pengawasan	--	--	--	11,38	--	--	--	11,38	--	--	--	100%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	--	--	--	90%	--	--	--	100%	--	--	--	111%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	--	--	--	70%	--	--	--	50%	--	--	--	71%
Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	--	--	--	82	--	--	--	81,35	--	--	--	99%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)				
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7)/(6)	(12) = (8)/(6)	(13) = (9)/(6)	(14) = (10)/(6)	
Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Nilai PMPRB BPOM yang di-submit secara online	--	--	--	89,55	--	--	--	89,55	--	--	--	100%	
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RB BPOM	--	--	--	70%	--	--	--	89%	--	--	--	127%	
	Jumlah unit kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM hasil evaluasi internal	WBK:13	--	--	WBK:13	WBK:13	--	--	WBK:13	WBK:13	--	--	100%	100%
		WBBM:3	--	--	WBBM:3	WBBM:3	--	--	WBBM:3	WBBM:3	--	--	100%	100%
<b>Internal Process Control</b>														
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	--	--	--	90%	--	--	--	90%	--	--	--	100%	
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN tepat waktu	--	99%	99%	99%	--	100%	100%	100%	--	101%	101%	101%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7)/(6)	(12) = (8)/(6)	(13) = (9)/(6)	(14) = (10)/(6)
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN tepat waktu	--	80%	80%	80%	--	72%	72%	72%	--	90%	90%	90%
	Persentase kepatuhan penyampaian laporan gratifikasi tepat waktu	80%	80%	80%	80%	100%	75%	83%	66%	125%	94%	104%	83%
Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	--	--	--	80%	--	--	--	92%	--	--	--	115%
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	--	21	--	21	--	14	--	21	--	67%	--	100%
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	--	--	--	100%	--	--	--	100%	--	--	--	100%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern	--	--	--	85%	--	--	--	81,1%	--	--	--	95%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7)/(6)	(12) = (8)/(6)	(13) = (9)/(6)	(14) = (10)/(6)
<i>Learning and Growth Perspective</i>													
Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	--	--	--	78	--	--	--	75,31	--	--	--	97%
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Level Kapabilitas APIP	--	--	--	Level 3	--	--	--	Level 3	--	--	--	100%

**Lampiran 6**

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT II TAHUN 2018**

No	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	Implementasi Reformasi Birokrasi		193.570.000	178.301.368	92,11%
		Rapat Evaluasi Implementasi RB dan Program Anti Korupsi	<u>Input:</u> Dana (Rp)	64.380.000	62.780.800	97,52%
			<u>Output:</u> Laporan hasil rapat evaluasi implementasi RB dan Program anti korupsi (Lap)			
		Monitoring dan evaluasi (MONEV) pelaksanaan program reformasi birokrasi BPOM	<u>Input:</u> Dana (Rp)	78.400.000	71.951.268	91,77%
			<u>Output:</u> Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program RB BPOM (Lap)			
		Evaluasi pelaksanaan RB oleh KemenPAN RB	<u>Input:</u> Dana (Rp)	50.790.000	43.569.300	85,78%
<u>Output:</u> Laporan evaluasi pelaksanaan RB oleh KemenPAN RB (Lap)						
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	Dukungan manajemen pengawasan intern - Subbag II		1.110.870.000	1.088.048.819	97,95%
		Administrasi Kegiatan	<u>Input:</u> Dana (Rp)	249.310.000	238.452.719	95,65%
			<u>Output:</u> Waktu pelaksanaan (bulan)			
		Administrasi Keuangan	<u>Input:</u> Dana (Rp)	3.000.000	3.000.000	100,00%

No	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
			<u>Output:</u> Waktu pelaksanaan (bulan)			
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan (Inspektorat II)	<u>Input:</u> Dana (Rp)	13.120.000	5.619.600	42,83%
			<u>Output:</u> Laporan Pengawasan, Laporan Tahunan, LAKIP (Lap)			
		Pengadaan Alat Pengolahan Data	<u>Input:</u> Dana (Rp)	475.678.000	473.815.500	99,61%
			<u>Output:</u> Alat pengolah data (Unit)			
		Pengadaan Meubelair	<u>Input:</u> Dana (Rp)	29.439.000	28.000.000	95,11%
			<u>Output:</u> Meubelair (unit)			
		Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2	<u>Input:</u> Dana (Rp)	80.000.000	79.781.000	99,73%
			<u>Output:</u> Kendaraan bermotor roda 2 (Unit)			
		Pengadaan Aplikasi	<u>Input :</u> Dana (Rp)	226.380.000	226.380.000	100,00%
			<u>Output:</u> Aplikasi pengawasan (Pkt)			
		Pengadaan Meubelair	<u>Input :</u> Dana (Rp)	33.943.000	33.000.000	97,22%
			<u>Output:</u> Aplikasi pengawasan (Pkt)			
3		Implementasi Bidang Penguatan Pengawasan		963.620.000	816.790.610	84,76%

No	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)	
	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	Intervensi pemenuhan indikator WBK dan WBBM	<u>Input:</u> Dana (Rp)				
			<u>Output:</u> Laporan hasil intervensi pemenuhan indikator WBK dan WBBM (lap)	123.000.000	122.194.750	99,35%	
		Rapat Finalisasi Usulan WBK/WBBM BPOM	<u>Input:</u> Dana (Rp)				
			<u>Output:</u> Lembar Kertas Evaluasi Penilaian mandiri (LKE)	40.870.000	32.896.910	80,49%	
		Kajian/Pedoman/Peraturan Inspektorat II	<u>Input:</u> Dana (Rp)				
			<u>Output:</u> Draft kajian/ pedoman/peraturan	14.860.000	12.427.000	83,63%	
		Rapat Evaluasi dan Perencanaan Strategis Ittama	<u>Input:</u> Dana (Rp)				
			<u>Output:</u> Notulen hasil rapat strategis dan perencanaan Ittama	784.890.000	649.271.950	82,72%	
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	Implementasi Bidang Penguatan Pengawasan		134.635.000	124.891.780	92,76%	
		Rapat evaluasi pelaksanaan pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	<u>Input:</u> Dana (Rp)				
			<u>Output:</u> Notulen	134.635.000	124.891.780	92,76%	
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang	Pelaksanaan pengawasan internal		788.375.000	785.715.248	99,66%	
		Audit	<u>Input:</u> Dana (Rp)	788.375.000	785.715.248	99,66%	

No	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
	andal di lingkup wilayah Inspektorat II		<u>Output:</u> Laporan Hasil Audit (Lap)			
		Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		1.265.897.000	1.165.755.253	92,09%
		Implementasi dan Benchmarking IACM	<u>Input:</u> Dana (Rp)			
			<u>Output:</u> Laporan implementasi benchmarking IACM (Lap)	121.830.000	110.436.500	90,65%
		Penilaian Risiko dan Pemantauan SPIP	<u>Input:</u> Dana (Rp)			
			<u>Output:</u> Laporan hasil penilaian risiko dan pemantauan SPIP (Lap)	64.600.000	64.534.500	99,90%
		Diseminasi Hasil Evaluasi Implementasi SPIP, Manrisk, dan Program Anti Korupsi	<u>Input:</u> Dana (Rp)			
			<u>Output:</u> Laporan diseminasi hasil evaluasi implementasi SPIP dan Manajemen risiko (Lap)	65.280.000	62.145.000	95,20%
		Pertemuan Nasional Peningkatan Kompetensi dan Fungsi Three Lines of Defance dalam Implementasi Manajemen Risiko yang Terintegritas dengan ISO 9001:2015	<u>Input:</u> Dana (Rp)			
			<u>Output:</u> Laporan pelaksanaan pertemuan nasional peningkatan kompetensi dan fungsi Three Line Of Defence (Lap)	589.492.000	582.613.400	98,83%
		Pertemuan Nasional Penguatan Pelaksanaan RB dan Budaya Anti	<u>Input:</u> Dana (Rp)			

No	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)	
		Korupsi Untuk Mewujudkan Aparatur yang Berkinerja dan Berintegritas	<u>Output:</u> Laporan pelaksanaan pertemuan nasional penguatan RB dan Budaya anti korupsi (Lap)	424.695.000	346.025.853	81,48%	
		Implementasi Quality Management System		134.805.000	132.311.515	98,15%	
		Diseminasi Pra Audit Internal ISO 9001:2015	<u>Input:</u> Dana (Rp)				
			<u>Output:</u> Laporan hasil diseminasi pra audit internal ISO 9001:2015 (Lap)	76.065.000	75.287.499	98,98%	
		Audit Internal/Surveilan QMS/RTM Inspektorat II ISO 9001:2015	<u>Input:</u> Dana (Rp)				
			<u>Output:</u> Laporan hasil audit surveilan QMS ISO 9001:2015 (lap)	58.740.000	57.024.016	97,08%	
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	Pelaksanaan pengawasan internal		489.685.000	457.215.751	93,37%	
		Reviu	<u>Input:</u> Dana (Rp)				
			<u>Output:</u> Laporan Hasil Reviu (Lap)	59.960.000	54.729.100	91,28%	
		Bimbingan Teknis Inspektorat II	<u>Input:</u> Dana (Rp)				
<u>Output:</u> Laporan Pelaksanaan Bimtek (Lap)	429.725.000		402.486.651	93,66%			
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Pelaksanaan pengawasan internal		108.050.000	103.715.900	95,99%	
		Evaluasi Lapkin Inspektorat II	<u>Input:</u> Dana (Rp)				

No	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
			<u>Output:</u> Laporan Hasil Evaluasi (Lap)	108.050.000	103.715.900	95,99%
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	Pengelolaan Human Capital Management (HCM)		940.380.000	901.022.474	95,81%
		Pelatihan Sertifikasi Auditor	<u>Input:</u> Dana (Rp)			
			<u>Output:</u> SDM yang mengikuti sertifikasi auditor (org)	32.950.000	30.960.000	93,96%
		Pelatihan/Workshop/Meeting Auditor	<u>Input:</u> Dana (Rp)			
			<u>Output:</u> Kegiatan pelatihan/workshop/ meeting internal audit (keg)	143.910.000	119.612.041	83,12%
		Workshop Internal Auditor(SNIA)	<u>Input:</u> Dana (Rp)			
			<u>Output:</u> Laporan workshop internal auditor (Lap)	21.136.000	21.135.000	100,00%
		Pelatihan Workshop Pegawai TU	<u>Input:</u> Dana (Rp)			
			<u>Output:</u> SDM yang mengikuti sertifikasi TU (org)	100.400.000	87.501.633	87,15%
		Pelatihan kantor sendiri	<u>Input:</u> Dana (Rp)			
			<u>Output:</u> Laporan penyelenggaraan PKS (lap)	7.200.000	7.200.000	100,00%

No	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL	REALISASI	PERSENTASE (%)
		Penyusunan majalah infowas	<u>Input:</u> Dana (Rp)			
			<u>Output:</u> Majalah Infowas (Pkt)	225.000	225.000	100,00%
		Diklat Investigasi/ Intelijen	<u>Input:</u> Dana (Rp)			
			<u>Output:</u> SDM yang mengikuti sertifikasi Investigasi/Intelijen (org)	206.340.000	206.339.500	100,00%
		Rapat Evaluasi Ittama dan Workshop Peningkatan Kompetensi Three Line of Defance di Belitung	<u>Input:</u> Dana (Rp)			
			<u>Output:</u> Laporan rapat evaluasi Ittama dan workshop peningkatan kompetensi Three Line of Defence (Lap)	198.539.000	198.489.300	99,97%
		Inhouse CRMO	<u>Input:</u> Dana (Rp)			
			<u>Output:</u> Laporan pelaksanaan <i>in house</i> CRMO (Lap)	229.680.000	229.560.000	99,95%

**Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp.6.129.887.000,-**

**Realisasi Anggaran : Rp.5.753.768.718,-**

**Lampiran 7****PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN INSPEKTORAT II TAHUN 2018**

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		Input (%)	Output (%)				
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat II	92,11%	94%	1,02	1,00	0,02	Efisien
2	Meningkatnya peran Inspektorat II sebagai Trusted Advisor	93,08	99%	0,01	1,00	-0,99	Tidak Efisien
3	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas dari KKN	84,76%	107%	1,26	1,00	0,26	Efisien
4	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat II	92,76%	93%	1,00	1,00	0,00	Efisien
5	Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat II	96,00%	134%	1,40	1,00	0,40	Efisien
6	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat II	92,00%	98%	1,07	1,00	0,07	Efisien
7	Terwujudnya RB Inspektorat II sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	95,99%	96%	1,00	1,00	0,00	Efisien
8	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	97,55%	100%	1,03	1,00	0,03	Efisien

**Lampiran 9**

**REKAPITULASI HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN INTERNAL INSPEKTORAT II 2018**

Dimensi Quality Service	Variabel Indikator	SK	K	C	B	SB	Total	Skor	SK	K	C	B	SB	Total
<b>Wujud Fisik (Tangible)</b>	1 Penyajian Laporan Hasil audit (ringkas, lengkap, mudah dipahami)	-	-	-	9	1	10	0,82	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%
	2 Ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Audit (sangat kurang >40 hari; Baik: < 10 hari sejak tanggal Laporan Hasil Audit terbit)	-	-	-	9	1	10	0,82	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%
	3 Rumusan temuan audit (didukung data dan informasi empiris serta tanggapan obyek audit)	-	-	-	9	1	10	0,82	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%
	4 Rumusan penyebab temuan (merupakan penyebab hakiki/akar masalah)	-	-	3	7	-	10	0,74	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%
<b>Keandalan (Reability)</b>	1 Kecakapan tim audit dalam melaksanakan audit (wawasan terhadap SAP dan bisnis proses, organisasi, program dan fungsi)	-	-	3	5	2	10	0,78	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
	2 Pemahaman tim tentang peraturan perundang-undangan yang terkait sasaran audit	-	-	4	4	2	10	0,76	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
	3 Relevansi penetapan ruang lingkup dengan tujuan audit	-	-	-	9	1	10	0,82	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	100,00%
	4 Pengetahuan tim audit tentang teknis kegiatan yang diaudit	-	-	2	7	1	10	0,78	0,00%	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%	100,00%
	5 Kesesuaian lamanya audit dengan beban kerja audit	-	-	2	7	1	10	0,78	0,00%	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%	100,00%
	6 Kejelian tim audit dalam mengidentifikasi masalah	-	-	2	6	2	10	0,80	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
	7 Manfaat entry meeting dalam menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan sasaran audit	-	-	-	8	2	10	0,84	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%

Dimensi Quality Service	Variabel Indikator		SK	K	C	B	SB	Total	Skor	SK	K	C	B	SB	Total
	8	temuan auditor membantu auditi meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur	-	-	-	7	3	10	0,86	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
	9	temuan auditor meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari operasional organisasi	-	-	-	8	2	10	0,84	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
<b>Kesigapan (Responsiveness)</b>	1	Ketepatan tim audit dalam memberikan solusi/pemecahan masalah	-	-	5	5	-	10	0,70	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	2	Respon tim audit dalam menerima informasi dari obyek audit dalam entry meeting	-	-	1	7	2	10	0,82	0,00%	0,00%	10,00%	70,00%	20,00%	100,00%
	3	Rumusan rekomendasi audit membantu peningkatan kinerja dan mencegah temuan audit eksternal (BPK)	-	-	-	8	2	10	0,84	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
	4	Waktu yang tersedia untuk memberikan tanggapan terhadap Daftar Temuan Hasil Audit	-	-	1	8	1	10	0,80	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%	10,00%	100,00%
	5	Manfaat pemantauan tindak lanjut oleh Tim Inspektorat terhadap percepatan penuntasan tindak lanjut.	-	-	2	6	2	10	0,80	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
	6	Sinergi antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (BPKP dan inspektorat jenderal kementerian/lembaga)	-	-	-	7	2	9	0,84	0,00%	0,00%	0,00%	77,78%	22,22%	100,00%
<b>Jaminan (Assurance)</b>	1	penyajian temuan auditor dilakukan secara objektif	-	-	3	5	2	10	0,78	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
	2	auditor dapat menjaga kerahasiaan data informasi auditi	-	-	1	5	4	10	0,86	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%	100,00%
	3	Kemampuan tim audit berinteraksi pada saat audit	-	-	3	6	1	10	0,76	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	100,00%
<b>Empati (Empathy)</b>	1	auditor memahami kebutuhan organisasi auditi	-	-	2	7	1	10	0,78	0,00%	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%	100,00%
	2	Tim Audit dalam mendorong "PNS" agar dapat menjalankan tugas secara benar	-	-	1	7	2	10	0,82	0,00%	0,00%	10,00%	70,00%	20,00%	100,00%

Dimensi Quality Service	Variabel Indikator	SK	K	C	B	SB	Total	Skor	SK	K	C	B	SB	Total
	sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya													
3	Peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi sebagai <i>watchdog</i> (ketaatan)	-	-	-	7	3	10	0,86	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
4	Peran Inspektorat dalam menjalankan fungsinya sebagai konsultan pelaksanaan program dan anggaran	-	-	2	5	3	10	0,82	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
5	Peran Inspektorat dalam menjalankan fungsinya memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah melalui audit, review, pendampingan, evaluasi, dll ( <i>Assurance</i> );	-	-	1	5	4	10	0,86	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%	100,00%
6	Peran Inspektorat dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah ( <i>Risk Management</i> )	-	-	-	6	4	10	0,88	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%
7	Peran Inspektorat dalam menjalankan fungsinya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah ( <i>Accountability</i> ).	-	-	1	6	3	10	0,84	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	30,00%	100,00%
8	Peran Inspektorat dalam menjalankan fungsinya sebagai penanggungjawab pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan ( <b>Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian Benturan Kepentingan, Koordinator WBK/WBBM</b> )	-	-	-	6	4	10	0,88	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%
		-	-	39	201	59	299	81,35%						100,00%



**Lampiran 8**

**SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>2018</b>
1	Alat Pengolah Data	35 unit
2	Meubelair	2 unit
3	Kendaraan Bermotor Roda 2	4 unit
4	Aplikasi	2 unit

**Lampiran 10****HASIL PENILAIAN PM-EPITE TAHUN 2018**

<b>No.</b>	<b>Unit</b>	<b>Nilai</b>
1	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	95
2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	94
3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	96
4	Direktorat Pengawasan Kosmetik	95
5	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	
6	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
7	Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	
8	Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	
9	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	87
10	Direktorat Pengamanan	89
11	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	78
12	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	
13	BBPOM di Banjarmasin	77
14	BBPOM di Denpasar	95
15	BBPOM di Jayapura	88
16	BBPOM di Kendari	99
17	BBPOM di Manado	
18	BBPOM di Medan	92
19	BBPOM di Padang	99
20	BBPOM di Pontianak	92
21	BBPOM di Semarang	98
22	BBPOM di Serang	92
23	BBPOM di Yogyakarta	94
24	BPOM di Ambon	81
25	BPOM di Batam	87
26	BPOM di Bengkulu	94
27	BPOM di Mamuju	90
28	BPOM di Pangkal Pinang	96
29	BPOM di Sofifi	99
<b>RATA-RATA</b>		<b>91,609</b>

**Lampiran 11****HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Nilai</b>
1	Balai POM di Batam	72,63
2	Balai POM di Bengkulu	73,15
3	Balai POM di Pangkalpinang	73,57
4	Balai POM di Sofifi	60,63
5	Balai Besar POM di Manado	73,13
6	Balai Besar POM di Banjarmasin	71,87
7	Balai Besar POM di Medan	73,65
8	Balai Besar POM di Padang	72,03
9	Balai Besar POM di Semarang	72,04
10	Balai Besar POM di Yogyakarta	73,58
11	Balai Besar POM di Denpasar	70,87
12	Balai Besar POM di Pontianak	72,06
13	Balai Besar POM di Jayapura	71,35
14	Balai POM di Serang	72,24
15	Balai POM di Ambon	73,22
16	Balai POM di Kendari	71,15
17	Balai POM di Mamuju	0
18	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	73,58
19	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	71,08
20	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	70,24
21	Direktorat Pengawasan Kosmetik	70,24
22	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	70,58
23	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	74,85
24	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	72,04
25	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	73,17
26	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	63,62
27	Direktorat Pengamanan	0
28	Direktorat Intelijen	0
29	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	70
<b>Nilai Rata-Rata</b>		<b>71,407</b>

**Lampiran 12**

## Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unit Pelayanan Tahun 2017 dan 2018 (Wilayah Inspektorat II)

No.	Unit Pelayanan	NILAI 2017	NILAI 2018	Kenaikan/ Penurunan
1	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	74,06	80,30	6,24
2	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	-	86,13	-
3	Direktorat Pengawasan Kosmetik	-	87,85	-
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	75,47	80,53	5,06
5	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	82,29	83,08	0,79
6	Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	-	79,45	-
7	Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	-	79,17	-
8	BBPOM di Banjarmasin	88,96	82,47	(6,49)
9	BBPOM di Denpasar	83,56	86,39	2,83
10	BBPOM di Jayapura	78,33	79,72	1,39
11	BBPOM di Kendari	87,03	80,17	(6,86)
12	BBPOM di Manado	75,55	80,70	5,15
13	BBPOM di Medan	81,44	82,50	1,06
14	BBPOM di Padang	84,94	76,75	(8,19)
15	BBPOM di Pontianak	82,96	79,17	(3,79)
16	BBPOM di Semarang	84,87	80,78	(4,09)
17	BBPOM di Serang	-	85,71	-
18	BBPOM di Yogyakarta	83,75	81,48	(2,27)
19	BPOM di Ambon	96,38	82,64	(13,74)
20	BPOM di Batam	85,51	81,72	(3,79)
21	BPOM di Bengkulu	85,51	86,18	0,67
22	BPOM di Pangkal Pinang	87,46	83,70	3,76

**Lampiran 13****Monitoring Status Temuan Audit Inspektorat Badan POM****Tahun Audit s.d. Tahun 2018 Per 31 Des 2018**

<b>NO</b>	<b>Nama Unit Kerja</b>	<b>Tahun Audit</b>	<b>Σ Temuan</b>	<b>Σ Rekomendasi</b>	<b>SS</b>	<b>BSS</b>	<b>BTL</b>	<b>Nilai Setor (Rp)</b>	<b>Telah Setor (Rp)</b>	<b>Kurang (Lebih) Setor (Rp)</b>
1	BBPOM di Medan	2014	5	15	15	0	0	34.195.041	34.195.041	-
		2015	3	7	7	0	0	6.310.000	6.310.000	-
		2016	6	12	8	4	0	1.981.111	1.981.111	-
		2017	4	4	0	2	2	-	-	-
		2018	7	23	0	0	23	280.714.378	-	280.714.378
2	BBPOM di Padang	2013	9	20	20	0	0	42.154.470	42.154.470	-
		2014	8	27	27	1	0	105.972.916	84.216.390	21.756.526
		2015	6	10	10	0	0	13.794.750	13.794.750	-
		2016	5	14	12	2	0	12.848.543	8.336.993	4.511.550
		2017	2	4	2	2	0	-	-	-
		2018	3	26	5	20	1	40.825.611	2.785.811	38.039.800
3	BPOM di Bengkulu	2013	8	15	15	0	0	1.788.723	1.788.723	-
		2015	4	15	15	0	0	17.870.767	17.870.767	-
		2016	5	14	13	1	0	3.885.500	3.885.500	-

NO	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang (Lebih) Setor (Rp)
		2017	3	7	6	1	0	23.544.990	23.544.990	-
		2018	5	19	6	12	1	1.367.828	-	1.367.828
4	BPOM di Batam	2014	1	16	16	0	0	30.103.030	30.103.030	-
		2015	5	12	12	0	0	4.630.000	4.630.000	-
		2016	6	22	21	1	0	203.380	203.380	-
		2018	4	10	4	3	3			
5	BPOM di Pangkalpinang	2013	8	17	17	0	0	27.066.900	27.066.900	-
		2014	7	19	18	0	0	54.094.566	54.094.566	-
		2016	7	13	13	0	0	6.085.000	6.115.000	-
		2017	7	13	13	0	0	-	-	-
6	BPOM di Serang	2015	3	10	10	0	0	22.858.098	22.858.098	-
		2018	5	15	9	5	1	-	-	-
7	BBPOM di Semarang	2015	3	10	10	0	0	22.858.098	22.858.098	-
		2017	5	11	11	0	0	9.611.750	9.611.750	-
		2018	4	16	8	7	1	5.257.557	-	5.257.557
8	BBPOM di Yogyakarta	2014	9	16	16	0	0	179.790.228	179.790.228	-
		2017	7	16	7	9	0	-	-	-

NO	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang (Lebih) Setor (Rp)
9	BBPOM di Denpasar	2016	3	10	10	0	0	41.826.541	41.826.541	-
		2018	3	12	5	7	0			
10	BBPOM di Pontianak	2014	7	18	18	0	0	109.321.215	109.321.215	-
		2015	4	7	7	0	0	7.059.740	7.059.740	-
		2016	7	13	11	2	0	4.159.000	4.159.000	-
		2018	5	18	11	7	0	4.844.081	4.844.081	-
11	BBPOM di Banjarmasin	2014	9	25	25	0	0	43.122.693	43.122.693	-
		2015	6	11	9	2	0	8.162.782	8.175.468	-
		2016	5	19	9	6	4	-	-	-
		2017	3	7	2	4	1	974.489	974.489	-
		2018	3	11	8	2	1	-	-	-
12	BPOM di Mamuju	2017	7	14	14	0	0	6.575.000	6.575.000	-
		2018	6	16	0	0	16	321.380.819	-	321.380.820
13	BBPOM di Manado	2014	7	16	16	0	0	12.667.504	12.667.504	-
		2015	6	15	15	0	0	29.073.935	29.073.935	-
		2016	6	22	21	1	0	23.345.011	10.842.000	12.503.011
		2018	4	22	13	7	2	26.851.725	-	26.851.725

NO	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang (Lebih) Setor (Rp)
14	BBPOM di Kendari	2013	9	25	25	0	0	74.315.471	74.315.471	-
		2014	9	20	20	0	0	149.251.652	149.251.652	-
		2015	3	7	7	0	0	6.310.000	6.310.000	-
		2016	7	13	11	2	0	-	-	-
		2017	3	11	9	1	1	4.850.340	488.340	4.362.000
		2018	3	15	6	9	0	10.106.760	-	10.106.760
15	BBPOM di Sofifi	2016	8	20	16	2	2	4.000.000	-	4.000.000
		2017	5	14	10	4	0	5.179.417	5.179.417	-
		2018	4	11	0	0	11	-	-	-
16	BBPOM di Ambon	2013	7	19	19	0	0	57.629.100	57.629.100	-
		2014	7	22	22	0	0	19.417.650	19.417.650	-
		2015	5	13	13	0	0	6.981.900	6.981.900	-
		2016	8	15	15	0	0	4.914.206	4.914.206	-
		2017	5	12	9	2	1	820.400	820.400	-
		2018	4	7	3	2	2	24.684.182	24.684.182	-
17	BBPOM di Jayapura	2013	9	25	25	0	0	10.784.650	10.784.650	-
		2015	5	11	10	0	0	33.287.000	34.191.582	(904.582)

NO	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang (Lebih) Setor (Rp)
		2016	5	12	8	4	0	15.783.252	15.783.252	-
		2017	2	3	3	0	0	-	-	-
		2018	4	22	19	2	1	45.575.184	7.855.184	37.720.000
18	Dit. Insert OT, Kos, SM	2015	3	2	2	0	0	-	-	-
19	Dit. Insert Pangan	2015	5	1	1	0	0	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>375</b>	<b>1004</b>	<b>793</b>	<b>136</b>	<b>74</b>	<b>2.063.068.933</b>	<b>1.295.444.248</b>	<b>767.667.372</b>
	<b>Persentase</b>				<b>78,98%</b>	<b>13,55%</b>	<b>7,37%</b>		<b>0,63</b>	<b>0,6</b>

**Lampiran 14****Realisasi Pelatihan Pegawai Inspektorat Tahun 2018**

No	Nama Diklat/Seminar/Workshop	Tanggal Pelaksanaan	Nama Peserta	Penyelenggara	Sumber Dana
1	Bimbingan Teknis Nasional Probitiy Audit Pengadaan Barang/Jasa	5-6 April 2018	Dra. Zulaimah, Apt., M.Si	LIM-SDMI	DIPA Inspektorat II
			Ir. Noviana Susanti		
2	Pelatihan Fraud Auditing 2 (FA-2)	24-27 April 2018	Ardianto Nugroho, S.Farm, Apt	LPFA	DIPA Inspektorat II
3	Teknik Wawancara, Permintaan Keterangan dan Pembuatan Berita Acara dalam Audit Investigatif	17-18 Mei 2018	Farizka Dhian Widyartanti, SH	LPFA	DIPA Inspektorat II
			Wikan Yogi Pratomo, SE		
			Dedi Gunawan, S.TP		
4	ISO 9001:2015	23-24 Juli 2018	Achmad Bagus Yustiawan, SE	PPSDM Badan POM	DIPA Inspektorat II
			Indra Ramadhani, SE		
5	Pelatihan Fraud Auditing 1 (FA-1)	24-27 Juli 2018	Fadhila Nurfida Hanif, S. Farm, Apt	LPFA	DIPA Inspektorat II
			Brigitta Melati I O, S. Farm, Apt		
			Elida Sari Silalahi, SE		
			Istiqomah, S.Si		
6	Interpersonal Softskills	30-31 Agutsus 2018	Indra Ramadhani, SE	PPM Manajemen	DIPA Inspektorat II
			Achmad Bagus Yustiawan, SE		
			Fernando Nainggolan, SE		
			Yahya Rikaro Utomo, S.AP		
			Ardhian Triwiratno, SE		
7	Pengadaan Barang/Jasa	24-29 September 2018	Indra Ramadhani, SE	PPM Manajemen	DIPA Inspektorat II
			Achmad Bagus Yustiawan, SE		
			Ardhian Triwiratno, SE		
			Yahya Rikaro Utomo, S.AP		
		3-7 Desember 2018	Fernando Nainggolan, SE		
8	Certified Risk Manajement Officer (CRMO)	9-12 Oktober 2018	Mahardhika Hestingtyas, S.Farm, Apt	PPM Manajemen	DIPA Inspektorat II

No	Nama Diklat/Seminar/ Workshop	Tanggal Pelaksanaan	Nama Peserta	Penyelenggara	Sumber Dana
9	Continues Auditing	12-13 Desember 2018	Dra. Zulaimah, Apt., M.Si	YPIA	DIPA Inspektorat II
			Ir. Noviana Susanti		
			Agus Sulisno, S.Si, Apt		
			Atiek Supardiati		
			Moh. Nur Herman Syah, S.Farm, Apt., M.Ak		
10	Penilaian Angka Kredit JFA di Lingkungan APIP	21-24 November 2018	Moch. Fahrul Rizal, SH	Pusdiklatwas BPKP	DIPA Irtama
11	Pengadaan Barang/Jasa	24-29 September 2018	Moch. Fahrul Rizal, SH	PPM Management	DIPA Irtama

## Lampiran 15

### Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2018

No.	Proses	Nilai	%
1	Manajemen perubahan	4,82	96,4%
2	Penataan peraturan perundang-undangan	4,38	87,5%
3	Penataan dan penguatan organisasi	5,01	83,5%
4	Penataan tata laksana	4,67	93,4%
5	Penataan sistem manajemen SDM	14,78	98,53%
6	Penguatan akuntabilitas	5,52	92,00%
7	Penguatan pengawasan	11,38	94,83%
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	5,57	92,83%
<b>Total Proses (60)</b>		<b>56,13</b>	<b>93,55%</b>

No.	Proses	Nilai	%
1	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (20)	15,62	78,1%
2	Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN (10)	8,6	86%
3	Kualitas pelayanan publik (10)	9,2	92%
<b>Total Hasil (40)</b>		<b>33,42</b>	<b>83,55%</b>
<b>Indeks RB (100)</b>		<b>89,55</b>	